



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA) LANGSUNG
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH (KPUD)
DAN PANITIA PENGAWAS (PANWAS)
KABUPATEN GORONTALO
TAHUN 2005**

**DI
LIMBOTO**

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN VII MAKASSAR
JANUARI 2006**

DAFTAR ISI

Simpulan Pemeriksaan.....	1
BAB I	Gambaran Umum..... 4
	A. Dasar Pemeriksaan..... 4
	B. Tujuan Pemeriksaan..... 4
	C. Jenis Pemeriksaan 4
	D. Standar Pemeriksaan..... 5
	E. Metodologi Pemeriksaan 5
	F. Objek Pemeriksaan 5
	G. Lingkup Pemeriksaan..... 5
BAB II	Hasil Pemeriksaan
	A. Hasil pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern
	1. Hasil Pemeriksaan Atas Efektivitas Pengendalian Intern KPUD..... 6
	2. Hasil Pemeriksaan Atas Efektivitas Pengendalian Intern PANWAS..... 7
	B. Hasil Pemeriksaan Atas Ketaatan Pada Peraturan Perundang- Undangan
	1. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)Kabupaten Gorontalo 9
	2. Panitia Pengawas (Panwas) Kabupaten Gorontalo 21
BAB III	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada..... 26
	Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas KPUD Kabupaten Gorontalo 26
	Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Panwas Kabupaten Gorontalo 40
LAMPIRAN-LAMPIRAN	47



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

SIMPULAN PEMERIKSAAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 23E Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1973, dan Undang-Undang No. 15 Tahun 2004, kami telah melakukan pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada Kabupaten Gorontalo untuk tahun 2005. Pemeriksaan kami bertujuan untuk menilai dan menguji Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan tersebut telah dilaksanakan secara memadai dan taat terhadap peraturan perundang-undangan tertentu. Tanggung jawab kami terletak pada simpulan atas kondisi yang kami ungkapkan.

Kami melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Audit Pemerintahan (SAP) BPK-RI. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar kami memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Simpulan kami telah didukung bukti yang relevan. Hal-hal yang tidak kami uji tidak menjadi dasar kami dalam mengambil kesimpulan.

Terhadap Pertanggungjawaban yang kami uji, kami menyimpulkan:

1. SPI telah dirancang secara memadai namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

a. Hasil Pemeriksaan atas efektivitas pengendalian intern pada KPUD

1. Prosedur penunjukan langsung tidak mengikuti Pedoman Pengadaan Barang Pemerintah
2. Penatausahaan Logistik PILKADA kurang memadai
3. Kebijakan Pengangkatan atasan langsung bendaharawan yang bukan pejabat struktural kurang tepat.
4. Kualifikasi personalia belum sepenuhnya sesuai kebutuhan.

b. Hasil Pemeriksaan atas efektivitas pengendalian intern pada PANWAS

- 1) Pengangkatan personil Bendahara Panwas Kecamatan bukan Pegawai Negeri tidak tepat.
- 2) Prosedur pengeluaran belanja tidak tertib.
- 3) Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana belum dilaksanakan secara tepat waktu.

2. Pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada KPUD dan Panwas telah mengikuti peraturan yang berlaku, namun masih ditemukan kelemahan-kelemahan yang kurang signifikan sebagai berikut:

a. Hasil Pemeriksaan atas ketaatan kepada peraturan perundangan pada KPUD.

- 1) Biaya perjalanan dinas keluar daerah melebihi batasan tertinggi menurut KMK. 7/KMK/2003.
- 2) Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak sesuai ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ/2000.
- 3) Pembebanan PPh Pasal 22 kepada KPUD dalam Pengadaan Logistik PILKADA Tidak Sesuai Keppres Nomor 80 Tahun 2003 jo. Keppres Nomor 61 Tahun 2004 jo. Perpres Nomor 32 Tahun 2005.
- 4) Penyetoran pungutan pajak dengan nilai sebesar Rp 48.457.720,00 tidak tertib.

- 5) Pembayaran honor anggota Kelompok Kerja sebesar Rp 3.175.000,00 melebihi batas tertinggi dan pembayaran honor anggota Kelompok Kerja sebesar Rp 6.000.000,00 tidak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005.

b. Hasil Pemeriksaan atas ketaatan kepada peraturan perundangan pada PANWAS.

- 1) Pembayaran Biaya Kehormatan/Jasa Panwas Pilkada tidak sesuai Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2005.
- 2) Penyetoran Pungutan Pajak sebesar Rp 6.263.500,00 tidak tertib.
- 3) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Belanja PILKADA Tahun 2005.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, kami merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Gorontalo memperbaiki kelemahan tersebut sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Makassar, Januari 2005
PENANGGUNG JAWAB
PEMERIKSAAN

Drs. Supriyanto
NIP. 240 000 915

BAB I

GAMBARAN UMUM

A. Dasar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Keuangan Pelaksanaan PILKADA berdasarkan:

1. Amandemen Ketiga UUD 1945 Pasal 23 E
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan RI;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemilihan Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005

B. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada bertujuan untuk menilai dan menguji apakah:

1. Sistem Pengendalian Intern (SPI) Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai.
2. Entitas yang diperiksa dalam melaksanakan kegiatannya telah mematuhi persyaratan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan tertentu.

C. Jenis Pemeriksaan

Sesuai dengan tujuan pemeriksaan tersebut, maka jenis pemeriksaan yang dilaksanakan adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

D. Standar Pemeriksaan

Standar yang digunakan dalam pemeriksaan adalah Standar Audit Pemerintahan (SAP) BPK-RI

E. Metode Pemeriksaan

Metodologi pemeriksaan dilakukan antara lain dengan:

1. Pengumpulan dan analisa data untuk mencapai tujuan audit.
2. Pengumpulan data dilakukan dengan pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik, dan tanya jawab.
3. Metode analisa yang digunakan oleh auditor adalah analisa prosedur, pengujian data, analisis hasil, survei, dan analisis kuantitatif.
4. Pemeriksaan dilakukan dengan uji petik (sampling) pada unit yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan Keuangan dalam penyelenggaraan Pilkada.

F. Obyek Pemeriksaan

Obyek Pemeriksaan adalah pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada pada KPUD dan Panwas Kabupaten Gorontalo

G. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan atas Pertanggungjawaban Keuangan Penyelenggaraan Pilkada hanya mencakup dana Penyelenggaraan Pilkada oleh KPUD tidak termasuk operasional KPUD diluar Penyelenggaraan Pilkada. Dengan lingkup tersebut, maka sasaran pemeriksaan:

1. Sistem Pengendalian Intern
2. Posisi Kekayaan Entitas Pasca Penyelenggaraan Pilkada
3. Belanja Operasional Penyelenggaraan Pilkada
4. Logistik Penyelenggaraan Pilkada

BAB II

A. HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Hasil pengujian dan penelahaan atas Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Panitia Pengawas (Panwas) Kab. Gorontalo, menunjukkan masih terdapat kelemahan dalam kegiatan pengelolaan keuangan maupun pertanggungjawaban keuangan Penyelenggaraan Pilkada dengan uraian sebagai berikut :

1. Hasil Pemeriksaan Atas Efektivitas Pengendalian Intern pada KPUD

- a) Prosedur Penunjukan Langsung Tidak Mengikuti Pedoman Pengadaan Barang Pemerintah

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas prosedur pengadaan diketahui bahwa Panitia Pengadaan Barang Tidak melakukan klarifikasi dan negosiasi dengan cermat. Hal ini dapat disimpulkan dari adanya perhitungan PPh Pasal 22 dalam Kontrak Pengadaan Barang meskipun telah dilakukan negosiasi harga sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran oleh KPUD.

- b) Penatausahaan Logistik PILKADA kurang memadai

Dari hasil wawancara dengan personil yang bertanggung jawab terhadap administrasi dan penyimpanan logistik dan dari pemeriksaan fisik logistik Pilkada menunjukkan bahwa administrasi dan penyimpanan logistik kurang menjamin ketertiban administrasi barang. Sebagai contoh, atas pengembalian kartu pemilih yang salah/tidak sesuai data riil, tidak dibuatkan berita acara pengembalian yang menjelaskan berapa jumlah yang dikembalikan dan sebab-sebab dikembalikan. Hal ini dapat menimbulkan resiko penyalahgunaan kartu pemilih.

- c) Kebijakan pengangkatan atasan langsung bendahara yang bukan pejabat struktural kurang tepat.

Berdasarkan hasil evaluasi struktur organisasi pelaksanaan Pilkada Kabupaten Gorontalo diketahui adanya jabatan khusus Atasan Langsung Bendahara. Personel yang diangkat sebagai Atasan Langsung Bendahara

adalah staf pelaksana pada KPUD Kabupaten Gorontalo, bukan pejabat struktural di KPUD.

Penunjukan staf pelaksana menjadi atasan langsung bendaharawan bukan merupakan praktik yang lazim. Atasan langsung bendaharawan menjalankan fungsi pengendalian penggunaan anggaran, sehingga penunjukan staf pelaksana sebagai atasan langsung bendahara dapat menimbulkan resiko pengendalian dan inefisiensi.

- d) Kualifikasi personalia belum sepenuhnya sesuai kebutuhan.

Berdasarkan hasil evaluasi struktur organisasi dan penempatan personel serta hasil pekerjaan personalia pelaksana diketahui bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan. Kelemahan dimaksud adalah bahwa bendaharawan belum sepenuhnya memahami ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan tugasnya, antara lain berkaitan dengan kewajiban pemungutan dan penyetoran pajak. Disamping itu penempatan personel tidak sesuai latar belakang pendidikan, yaitu untuk jabatan Kepala Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat ditempatkan personil yang berlatar belakang pendidikan sarjana agama sementara untuk Kepala Sub Bagian Umum ditempatkan personel yang berlatar belakang pendidikan sarjana hukum.

2. Hasil Pemeriksaan Atas Efektivitas Pengendalian Intern pada PANWAS

- a) Pengangkatan Personil Bendahara Panwas Kecamatan bukan Pegawai Negeri tidak tepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris Panwas diketahui bahwa terdapat 2 (dua) orang bendahara Panitia Pengawas Kecamatan yang berstatus bukan PNS. Pengangkatan bendahara PPK yang bukan pegawai negeri sipil tidak sesuai dengan ketentuan sebagai diatur dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2005. Selanjutnya, apabila terjadi kasus kerugian Negara maka penyelesaiannya akan mengalami kesulitan.

- b) Prosedur pengeluaran belanja tidak tertib.

Berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti pengeluaran dan laporan pertanggungjawaban bendahara, diketahui bahwa terdapat pengeluaran-

pengeluaran yang tidak sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran. Realisasi pengeluaran yang dimaksud antara lain pengeluaran untuk honorarium anggota Panwas bulan September Tahun 2005 dan biaya-biaya konsumsi dalam rangka penanganan demonstrasi massa.

- c) Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana belum dilaksanakan secara tepat waktu.

Berdasarkan pemeriksaan atas materi dan penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Panwas Pilkada Kabupaten Gorontalo diketahui bahwa penyampaian laporan belum dilaksanakan secara tepat waktu. Disamping itu, penyajian laporan juga belum sepenuhnya menggambarkan kondisi yang riil.

Berdasarkan hasil pemeriksaan SPI atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pilkada dapat dinyatakan bahwa SPI telah dirancang secara memadai namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kelemahan sebagai diuraikan di atas.

B. HASIL PEMERIKSAAN ATAS KETAATAN PADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dalam pengelolaan dan penyusunan pertanggungjawaban keuangan penyelenggaraan Pilkada belum sepenuhnya mematuhi dan menaati ketentuan yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut :

B. 1. KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN GORONTALO

a. Biaya Perjalanan Dinas ke luar daerah melebihi batasan tertinggi menurut KMK Nomor 7/KMK/2003.

Berdasarkan hasil pemeriksaan ketaatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku atas pengeluaran biaya perjalanan dinas diketahui bahwa satuan biaya perjalanan dinas ke luar daerah pada KPUD Kabupaten Gorontalo tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam KMK. Nomor 7/KMK/.02/2003. Hasil pemeriksaan atas bukti-bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas ke luar daerah menunjukkan bahwa satuan biaya perjalanan dinas melebihi batasan tertinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi atas bukti-bukti perjalanan dinas keluar daerah (ke Jakarta) pada KPUD Kabupaten Gorontalo menunjukkan terdapat ketidakhematan sebesar Rp6.100.000,00 yang secara rinci disajikan dalam Lampiran I.

Satuan biaya perjalanan dinas luar daerah yang berlaku pada KPUD Kabupaten Gorontalo mengacu pada SK. Bupati Nomor 429 Tahun 2005 tanggal 4 Maret 2005 tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005. Adapun perbandingan satuan biaya perjalanan dinas yang berlaku pada KPUD Kabupaten Gorontalo dengan ketentuan batasan tertinggi sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Pangkat Golongan	Biaya/Hari Pada KPUD	Biaya/Hari Menurut KMK. 7/KMK/2005 (Ibu Kota Provinsi)	Selisih
Perjalanan Ke Wilayah Jawa				
1.	Golongan IV	575.000,00	300.000,00	275.000,00
2.	Golongan III	475.000,00	260.000,00	215.000,00
3.	Golongan II	375.000,00	220.000,00	115.000,00
4.	Golongan I	375.000,00	180.000,00	195.000,00

Masalah tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/KMK/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap:

1. Pasal 1 ayat (1) Perjalanan Dinas Dalam Jabatan merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula.
2. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa besaran biaya perjalanan dinas sebagai disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini merupakan batasan tertinggi.
3. Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa biaya perjalanan dinas Pejabat Negara disamakan dengan perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A.
4. Pasal 11 ayat (1) poin a dan d menjelaskan bahwa untuk perjalanan dinas jabatan Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil eselon I dan II dan pejabat lainnya yang setara diberikan biaya transport dan uang harian dan dapat diberikan uang representase.

Masalah tersebut mengakibatkan ketidakhematan keuangan daerah atas pengeluaran biaya perjalanan dinas sebesar Rp 6.100.000,00 .

Masalah tersebut terjadi karena Standar Harga Satuan Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana diatur dalam SK. Bupati Nomor 429 Tahun 2005 yang dijadikan acuan penyusunan anggaran dan sebagai dasar pengeluaran biaya perjalanan dinas tidak mempedomani Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/KMK/2003.

Hal tersebut ditanggapi oleh Ketua KPUD Kabupaten Gorontalo bahwa kerangka Acuan KPU dalam menetapkan perjalanan Dinas Keluar Daerah adalah mengacu pada Keputusan Bupati Gorontalo Nomor 429 Tahun 2005 tentang standar Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo, karena anggaran yang digunakan adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2005 pada pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo. Selain kelebihan tersebut diatas ada beberapa yang melakukan perjalanan dinas yang tidak sempat terhitung yang harusnya dibayar, sehingga terkesan ada selisih lebih.

Atas masalah biaya perjalanan dinas tersebut BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Gorontalo agar meninjau kembali Surat Keputusan Bupati Nomor 429 Tahun 2005 tanggal 4 Maret 2005 tentang Penetapan Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 dengan mempedomani terhadap Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7/KMK/2003 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap

b. Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 tidak sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/PJ./2000.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pelaksanaan kewajiban pemungutan dan penyetoran pajak oleh Bendahara PILKADA Kabupaten Gorontalo diketahui bahwa penerapan tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas pembayaran honorarium dan insentif tidak sesuai ketentuan sebagai diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/pj./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.

Hasil pemeriksaan atas bukti bukti pembayaran honorarium dan imbalan lain ditemukan bahwa tarif pajak yang diterapkan atas pembayaran honorarium dan imbalan tersebut adalah 10%. Dengan demikian terjadi selisih kekurangan pemungutan sebesar 5% sehingga mengakibatkan kekurangan pemungutan pajak sebesar Rp3.558.750,00. Secara rinci kekurangan pemungutan pajak tersebut dapat dilihat pada Lampiran II.

Hal ini tidak sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-545/pj./2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, Pasal 15, yang mengatur bahwa atas pembayaran berupa honorarium dan imbalan lain dengan nama apapun yang diterima oleh pejabat Negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI yang sumber dananya berasal dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, kecuali yang dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil golongan II/d ke bawah dan anggota TNI/POLRI berpangkat Pembantu Letnan Satu ke bawah atau Ajun Inspektur Satu ke bawah dikenakan tarif 15% dan bersifat final dari jumlah bruto yang diterima.

Masalah tersebut di atas mengakibatkan kekurangan pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar Rp 3.558.750,00.

Masalah tersebut terjadi karena kurangnya pemahaman Bendahara KPUD mengenai ketentuan Pajak Penghasilan Pasal 21 tersebut.

Hal tersebut dikomentari oleh Ketua KPUD Kabupaten Gorontalo bahwa dalam hal Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 21 beberapa Pegawai Sekretariat pada saat Pemungutan PPh golongannya masih golongan II d sehingga belum dipungut PPh Pasal 21, sehingga hal tersebut menambah angka selisih kurang dalam pemungutan Pajak PPh Pasal 21 serta Bendahara dalam melakukan pemungutan PPh Pasal 21 berdasarkan perhitungan PTKP, serta belum adanya bintek terhadap bendaharawan dalam hal tata cara pemungutan pajak, sehingga tidak bisa membedakan mana pajak yang bersifat pinalti.

Atas komentar Ketua KPUD Kabupaten Gorontalo bahwa pada saat pemungutan pegawai terkait masih bergolongan II/d dapat dijelaskan bahwa berdasarkan bukti penerimaan honorarium, pegawai yang bersangkutan telah bergolongan III/a. Dengan demikian, komentar tersebut tidak tepat.

Atas masalah pemungutan pajak tersebut BPK- RI merekomendasikan kepada Bupati Gorontalo agar memerintahkan kepada Sekretaris KPUD Kabupaten Gorontalo selaku Kuasa Pengguna Anggaran supaya memerintahkan kepada Bendahara untuk segera melakukan pemungutan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 yang kurang dipungut tersebut sebesar Rp3.558.750,00 dan menyetor ke Kas Negara.

c. Pembebanan PPh Pasal 22 kepada KPUD dalam pengadaan logistik PILKADA tidak sesuai Keppres Nomor 80 Tahun 2003 jo. Keppres Nomor 61 Tahun 2004 dan Perpres Nomor 32 Tahun 2005.

Berdasarkan hasil evaluasi kontrak-kontrak pengadaan logistik keperluan PILKADA Kabupaten Gorontalo ditemukan bahwa dalam rekapitulasi biaya pengadaan barang/logistik diperhitungkan dalam anggaran biaya pengadaan sehingga menambah beban pembayaran yang harus dikeluarkan oleh KPUD Kab. Gorontalo. Praktik ini tidak sejalan dengan ketentuan dalam Keppres Nomor 80 Tahun 2003 jo. Keppres Nomor 61 Tahun 2004 dan Perpres Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Pemerintah. Sebagai diatur dalam BAB I poin E dari Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Pemerintah tersebut, penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak boleh memperhitungkan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia barang/jasa.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengadaan barang logistik Pilkada diketahui bahwa terdapat pembayaran pengadaan barang yang biayanya memperhitungkan PPh Pasal 22, sehingga telah terjadi kelebihan pembayaran kepada rekanan sebagai akibat kesalahan perhitungan Pajak Pasal 22 sebesar Rp10.268.670,38.

Dalam Rekapitulasi Biaya Rencana Anggaran Biaya pengadaan barang sebagai akan diuraikan berikut, Pajak Penghasilan Pasal 22 ditambahkan sebesar 1,5% dari real cost setelah dikurangi PPn. Dengan demikian PPh Pasal 22 tersebut menjadi beban pihak KPUD. Pembebanan PPh Pasal 22 kepada KPUD sebagai pengguna barang juga tidak sesuai dengan sifat PPh yang merupakan pajak langsung yang pembayarannya tidak boleh dibebankan kepada pihak lain. Hal ini berbeda dengan sifat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang merupakan pajak tidak langsung sehingga pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak pengguna jasa dhi. KPUD Kabupaten Gorontalo. Kontrak pengadaan barang yang biayanya memperhitungkan PPh Pasal 22 dimaksud adalah sebagai berikut:

No.	Kegiatan Pengadaan	Nomor Kontrak dan Bukti Pembayaran	Pelaksana	Real Cost	PPh yang diperhitungkan dalam kontrak
A	B	C	D	F	$G=(F- [F \times 10\%]) \times 1,5\%$
1	Pencetakan Kartu Suara	1. 110.1/KPU-KAB/V/2005 Tanggal 23 Mei 2005	PT. Puji Rahayu	252.787.000,00	3.412.624,50
2	Pencetakan Surat Suara	108.1/KPU-KAB/V/2005	PT. Graficindo Megah Utama	383.555.250,00	5.177.995,88
3	Pengadaan Formulir	Tanggal 18 Maret 2005	Syahdila	31.075.000,00	1.678.050,00 *)
	Jumlah			667.417.250,00	10.268.670,38

Catatan : *) Tarif pajak tidak jelas

Masalah tersebut di atas tidak sesuai dengan Lampiran Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 jo. Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 jo. Peraturan Presiden Nomor 32 tahun 2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Bab I butir E poin 2 yang mengatur bahwa Harga Perhitungan Sendiri tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lain-lain dan Pajak Penghasilan (PPH) penyedia barang/jasa.

Permasalahan di atas mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran harga pengadaan logistik PILKADA sebesar Rp 10.268.670,38.

Hal tersebut di atas terjadi karena Panitia Pengadaan Barang kurang cermat dalam melakukan evaluasi penawaran.

Permasalahan tersebut ditanggapi oleh Ketua KPUD Kabupaten Gorontalo bahwa Pembebanan PPh Pasal 22 kepada KPUD dalam pengadaan Logistik Pilkada yang sempat tercantum dalam Rekapitulasi Biaya Rencana Anggaran Biaya pengadaan Barang yang terkesan ditambahkan 1.5 % karena perhitungan harga penawaran dari Pihak Ketiga adalah dihitung sesuai harga satuan sebelum adanya pengenaan Pajak, sehingga secara global penawaran dari pihak ketiga per harga satuan dihitung sudah termasuk pajak. Dalam Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya tercantum 1.5 % PPh. Pada kenyataannya, saat pencairan dana oleh pihak ketiga melalui Bagian Keuangan Pemda Kab. Gorontalo, dipungut sebesar 2 % sesuai dengan ketentuan yang ada, yang tidak menambahkan pembayaran pada Pihak III, karena sudah termasuk pada harga penawaran secara

implisit. Pencantuman PPh pada Rekapitulasi RAB hanyalah semata – mata menegaskan kepada pihak ketiga bahwa penawaran diajukan dihitung sudah termasuk PPn dan PPh, yang akan dipungut oleh bendahara wajib pungut.

Atas masalah pembebanan PPh Pasal 22 tersebut BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Gorontalo agar memerintahkan kepada Sekretaris KPUD Kabupaten Gorontalo untuk menagih kelebihan pembayaran pengadaan barang logistik sebesar Rp 10.268.670,38 kepada masing-masing rekanan, selanjutnya disetor ke Kas Daerah.

d. Penyetoran pemungutan pajak sebesar Rp 48.257.720,00 tidak tertib.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Buku Kas Umum Bendahara PILKADA, pajak-pajak yang telah dipungut oleh Bendahara tidak disetorkan secara tertib yaitu paling lambat satu hari kerja sejak pemungutan dilakukan. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa terdapat pajak-pajak yang dipungut tersebut penyetorannya melebihi batas satu hari kerja. Keterlambatan penyetoran pajak-pajak tersebut adalah antara satu hari s.d 72 hari.

Pungutan Pajak-pajak yang penyetorannya terlambat tersebut terdiri dari:

1.	Pajak Penghasilan Pasal 21 sebesar	Rp	12.369.551 ,00
2.	Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar	Rp	1.513.982 ,00
3.	Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar	Rp	9.497.717 ,00
4.	Pajak Pertambahan Nilai sebesar	Rp	24.691.470 ,00
5.	Pajak Daerah sebesar	<u>Rp</u>	<u>185.000 ,00</u>
	Total	Rp	48.257.720 ,00

Keterlambatan penyetoran pajak-pajak tersebut adalah antara satu hari s.d. 72 hari. Secara rinci mengenai keterlambatan penyetoran pajak tersebut dapat dilihat pada Lampiran III.

Masalah tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 22 ayat (2) yang mengatur bahwa penerimaan Negara harus disetorkan ke rekening kas Negara pada setiap akhir hari kerja.

Masalah tersebut di atas mengakibatkan penundaan pemanfaatan penerimaan Negara/daerah dari pajak pajak yang dipungut sebesar Rp 48.257.720,00.

Masalah tersebut terjadi karena Bendahara kurang memahami kewajiban penyetoran pungutan pajak pada setiap akhir hari kerja.

Masalah tersebut ditanggapi oleh Ketua KPUD Kabupaten Gorontalo bahwa penyetoran pemungutan pajak sebesar Rp. 48.257.720,00.- mengalami keterlambatan penyetoran disebabkan oleh pengajuan pembiayaan KPUD ke Pemda Kabupaten Gorontalo realisasinya tidak sesuai dengan yang diajukan,

sehingga Pos-pos kegiatan yang sudah sangat mendesak ditanggulangi antara lain dari uang pungutan pajak, sehingga pembayaran pajak yang harusnya sudah tersetor tertunda pembayaran.

Atas masalah keterlambatan penyetoran pajak tersebut BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Gorontalo agar menegur Sekretaris KPUD Kabupaten Gorontalo selaku Kuasa Penggunaan Anggaran dan Bendahara KPUD atas kelalaiannya dalam penyetoran pajak yang tidak tepat waktu.

- e. Pembayaran honorarium Anggota Kelompok Kerja sebesar Rp 3.175.000,00 melebihi batas tertinggi dan pembayaran honorarium Anggota Kelompok Kerja sebesar Rp6.000.000,00 tidak sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005**

Berdasarkan hasil pemeriksaan bukti-bukti pengeluaran honor diketahui bahwa untuk honorarium anggota kelompok kerja pada KPUD Kabupaten Gorontalo tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan kelompok kerja tentang Perumusan dan Penyusunan Keputusan KPU yang dibayarkan tanggal 26 Maret 2005, honor per anggota bervariasi mulai dari Rp275.000,00 sampai Rp 650.000,00 . Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2005, honorarium per anggota pokja paling tinggi adalah Rp 250.000,00. Pembayaran honorarium dua kelompok kerja itu sejumlah Rp 6.425.000,00 padahal seharusnya Rp 3.250.000,00 (13 orang x Rp 250.000,00). Dengan demikian terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp 3.175.000,00. (termasuk PPh Pasal 21 yang dibayarkan sejumlah Rp 565.000,00) sebagaimana dirinci di Lampiran IV.

Selain itu, pemeriksaan atas bukti-bukti pengeluaran honorarium dan Surat Keputusan KPUD Kab. Gorontalo mengungkapkan bahwa terdapat 24 orang yang menjadi anggota satu kelompok kerja yaitu kelompok kerja Pengepakan Barang Logistik Pilkada Kabupaten Gorontalo yang honorinya dibayarkan tanggal 29 Juni 2005. Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2005, jumlah anggota pokja paling tinggi adalah 10 orang. Anggota kelompok kerja itu sejumlah 24 sehingga honor yang dibayarkan sejumlah Rp 6.000.000,00 (24 orang x Rp250.000,00). Dengan demikian terdapat pemborosan sebesar Rp3.500.000,00 (Rp 6.000.000,00 – Rp2.500.000,00) untuk satu kelompok kerja yang dimaksud sebagaimana dirinci di Lampiran IV.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2005, Lampiran I: Harga Satuan Tertinggi Belanja Pegawai, yang mengatur bahwa honor anggota pokja tertinggi adalah Rp 250.000,00 per orang, jumlah anggota paling banyak adalah 10 orang per pokja, dan masa kerja pokja paling lama 2 bulan.

Masalah tersebut mengakibatkan adanya indikasi kerugian daerah sebesar Rp3.175.000,00 (Rp565.000,00 + Rp 2.610.000,00). Sedangkan masalah adanya anggota pokja lebih dari 10 orang menunjukkan ketidakhematan minimal sebesar Rp3.500.000,00 (Rp6.000.000,00 – Rp 2.500.000,00).

Hal tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman ketua dan anggota KPUD dalam menerbitkan Surat Keputusan yang mendasari pembentukan masing-masing pokja.

Masalah tersebut ditanggapi bahwa penentuan pembayaran honor pokja pada tanggal 26 maret 2005 yang bervariasi dari Rp 275.000 sampai dengan Rp 650.000 masih mengacu pada SK Bupati Tahun 2005 tentang standarisasi barang dan jasa pemerintah daerah dan belum mengacu ke Peraturan Mendagri No. 21 Tahun 2005. Kemudian untuk 24 orang anggota pokja dalam pengepakan barang logistik pilkada Kabupaten Gorontalo, dibuat dalam satu surat keputusan untuk 4 kelompok kerja yang pembagian kerjanya berdasarkan daerah pemilihan dengan wilayah kecamatan yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh pekerjaan pengepakan logistik tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat oleh satu pokja yang hanya berjumlah 10 orang untuk 17 kecamatan. Sehingga dibagi dalam 4 kelompok kerja yang berjumlah 6 orang setiap kelompok per daerah pemilihan untuk pekerjaan yang sama yaitu pengepakan logistik pilkada.

Atas masalah pembayaran honorarium tersebut BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Gorontalo agar:

1. Memerintahkan Sekretaris KPUD selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara KPUD Kabupaten Gorontalo segera menyetor kelebihan sebesar Rp3.175.000,00 ke Kas Daerah.
2. Memberikan teguran tertulis kepada Ketua KPUD Kabupaten Gorontalo atas kelalaiannya dalam membentuk kelompok kerja yang tidak mengikuti ketentuan yang berlaku.

B. 2. PANITIA PENGAWAS (PANWAS) PILKADA KABUPATEN GORONTALO

a. Pembayaran Biaya Kehormatan/Jasa Panwas Pilkada Tidak Sesuai Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2005.

Berdasarkan pemeriksaan Buku Kas Umum Bendaharawan Panwas Pilkada Kabupaten Gorontalo ditemukan adanya pembayaran biaya kehormatan/jasa Panwas Pilkada. Biaya kehormatan/jasa Panwas Pilkada tersebut tidak tersedia dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pilkada Panwas Kabupaten Gorontalo. Disamping itu, dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2005 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2005, biaya kehormatan/jasa Panwas tersebut juga tidak disediakan pos pengeluarannya.

Selanjutnya, dari pemeriksaan bukti-bukti penerimaan diketahui bahwa biaya kehormatan/jasa Panwas diberikan untuk periode 7 (tujuh) bulan kerja yang dibayarkan sekaligus pada bulan September 2005 seluruhnya sebesar Rp22.400.000,00. Ketua Panwas menerima Rp 900.000,00 per bulan dan Wakil Ketua Panwas menerima Rp 800.000,00 per bulan, sedangkan anggota Panwas masing-masing menerima Rp 500.000,00 per bulan. Dengan demikian untuk periode masa bakti 7 bulan masing-masing menerima:

No	Nama	Jabatan	Uraian	Jumlah (Rp)
1	Drs. Safwan T. Bano	Ketua	900.000 x 7	6.300.000,00
2	Bahmid Ali,SE	Wakil Ketua	800.000 x 7	5.600.000,00
3	Ipda. S.F.Ch Rompas	Anggota	500.000 x 7	3.500.000,00
4	Sadtya Kurnia,SH	Anggota	500.000 x 7	3.500.000,00
5	Aljum Konawe, S.pd	Anggota	500.000 x 7	3.500.000,00
	Jumlah			22.400.000,00

Untuk mendapatkan pembayaran uang kehormatan/jasa ini Ketua Panwas telah mengajukan permohonan kepada Bupati Gorontalo sesuai Surat Panwas tanggal 20 September 2005 (tanpa nomor) perihal permohonan pemberian uang kehormatan. Permohonan ini belum mendapatkan jawaban/keputusan Bupati, namun uang kehormatan tersebut telah dibayarkan. Hal ini berarti pembayaran uang kehormatan tersebut belum mendapatkan otorisasi dari Bupati.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Pasal 10 Ayat (3) yang mengatur bahwa setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD apabila tidak tersedia atau tidak cukup tersedia anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; yang tidak menyediakan pos pengeluaran uang kehormatan/jasa bagi Panwas.

Permasalahan tersebut di atas mengakibatkan terjadinya indikasi kerugian daerah sebesar Rp 22.400.000,00.

Permasalahan tersebut di atas terjadi karena adanya keinginan anggota Panwas untuk menggunakan sisa dana/anggaran untuk dibayarkan sebagai uang kehormatan/jasa Panwas.

Temuan tersebut diakui kebenarannya dan sebenarnya Surat Permohonan yang dibuat oleh Panwas pada waktu itu telah disetujui oleh Bupati Gorontalo, suratnya berada di Bagian Keuangan Setda Kabupaten Gorontalo. Pelaksanaan di Panwas salah prosedur, seharusnya merupakan Dana Bantuan Operasional tetapi redaksi sebagai Uang Kehormatan dan hal ini akan diperbaiki dan mohon petunjuk dari Tim BPK.

Atas masalah pembayaran biaya kehormatan tersebut BPK-RI merekomendasikan kepada Bupati Gorontalo agar memerintahkan Ketua Panwas dan Sekretaris Panwas Kabupaten Gorontalo selaku Kuasa Pengguna Anggaran agar segera menarik uang kehormatan/jasa yang telah dibayarkan kepada masing-masing ketua dan anggota Panwas seluruhnya sebesar Rp 22.400.000,00 dan menyeteror ke Kas Daerah.

b. Penyetoran pungutan pajak sebesar Rp6.263.500,00 tidak tertib.

Berdasarkan hasil pemeriksaan Buku Kas Umum Bendahara Panitia Pengawas PILKADA, pajak-pajak yang telah dipungut oleh Bendahara tidak disetorkan secara tertib yaitu paling lambat satu hari kerja sejak pemungutan dilakukan. Hasil pemeriksaan menunjukkan terdapat pajak-pajak yang dipungut tersebut penyetorannya melebihi batas satu hari kerja yaitu antara 14 sampai dengan 154 hari.

Pungutan pajak-pajak yang penyetorannya terlambat tersebut terdiri atas:

Pajak Penghasilan Pasal 21	Rp 4.957.500,00
Pajak Penghasilan Pasal 23	Rp 336.000,00
Pajak Daerah (Hotel & Restoran)	<u>Rp 970.000,00</u>
Total	Rp 6.263.500,00

Keterlambatan penyetoran pajak tersebut secara rinci dapat dilihat pada Lampiran V.

Masalah tersebut tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 22 ayat (2) yang mengatur bahwa penerimaan Negara harus disetorkan ke rekening kas Negara pada setiap akhir hari kerja.

Masalah tersebut di atas mengakibatkan penundaan pemanfaatan penerimaan Negara dari pajak pajak yang dipungut senilai Rp6.263.500,00.

Masalah tersebut terjadi karena Bendahara kurang memahami kewajiban penyetoran pungutan pajak pada setiap akhir hari kerja.

Temuan ini diakui kebenarannya oleh Ketua Panwas Kabupaten Gorontalo bahwa hal ini disebabkan oleh karena yang ditunjuk selaku Bendahara masih pegawai baru dan belum pernah mengikuti pelatihan tentang Perbendaharaan, sehingga belum memahami sepenuhnya Peraturan Perundang-undangan.

Atas ketidaktertiban penyetoran pungutan pajak tersebut BPK-RI merekomendasikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo agar menegur Sekretaris Panitia Pengawas atas kelalaiannya dalam penyetoran pajak yang tidak tepat waktu.

c. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gorontalo belum menyusun dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Belanja Pilkada Tahun 2005

Dalam rangka mendukung kelancaran dan mengawasi jalannya pelaksanaan Pilkada, maka perlu dibentuk suatu panitia yang independen untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan pelaksanaan pemilihan. Untuk pengawasan terhadap seluruh tahap pelaksanaan Pilkada tersebut, maka berdasarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Gorontalo No 3 Tahun 2005 tanggal 29 Maret 2005 ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Panwas) Kabupaten Gorontalo Tahun 2005.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas Panwas, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo memberikan bantuan keuangan dengan anggaran alokasi dana sebesar Rp632.723.000,00 dan terealisasi sebesar Rp541.538.000,00.

Berdasarkan Pedoman Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Belanja Pilkada Panitia Pengawas Kabupaten diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Penerimaan dan Belanja Pilkada dan Laporan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pilkada. Laporan Penerimaan dan Belanja Pilkada terdiri dari Laporan Rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja dan Laporan Realisasi Belanja Per Kegiatan. Sedangkan Laporan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Pilkada Panwas terdiri dari: Laporan Realisasi Belanja Barang Inventaris/Modal, Laporan Realisasi Belanja Barang Persediaan Pakai Habis dan Laporan Pengadaan dan Penggunaan Jasa.

Laporan Pertanggungjawaban Belanja Pilkada harus disampaikan oleh Ketua Panwas kepada Kepala Daerah paling lambat satu minggu setelah pengucapan sumpah/janji Kepala Daerah terpilih. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban ini disertai Berita Acara Serah Terima sisa persediaan barang dan/atau sarana dan prasarana Pemerintah Daerah yang digunakan untuk Pilkada. Bupati/Wakil Bupati terpilih telah dilantik pada tanggal 29 September 2005 namun sampai saat pemeriksaan tanggal 5 Desember 2005 Laporan pertanggungjawaban Panwas belum disampaikan.

Permasalahan tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 279/536/BAKD tanggal 23 Agustus 2005 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Belanja Pilkada oleh KPUD dan Panwas Provinsi, Kabupaten/Kota.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2005 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2005 Pasal 32A yang mengatur bahwa Ketua Panwas menyampaikan laporan pertanggungjawaban belanja Pilkada yang disertai dengan berita acara serah terima sisa barang persediaan yang pengadaanya bersumber dari APBD dan/atau sarana dan prasarana Pemerintah Daerah yang digunakan untuk Pilkada kepada Kepala Daerah paling lambat satu minggu setelah pengucapan sumpah janji Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah yang terpilih dilantik.

Permasalahan di atas dapat mengakibatkan tidak segera diketahuinya penyimpangan pelaksanaan belanja Pilkada.

Keterlambatan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Belanja Pilkada tersebut disebabkan kurangnya pemahaman personel Panwas tentang kewajiban penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pilkada.

Temuan tersebut diakui kebenarannya oleh Ketua Panwas Kabupaten Gorontalo bahwa dalam hal ini sebenarnya laporan tersebut sudah lama dibuat hanya terlambat penyampaiannya.

Atas masalah keterlambatan penyampaian laporan tersebut BPK-RI merekomendasikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo agar menegur Ketua Panwas Kabupaten Gorontalo supaya segera menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Belanja Pilkada Tahun 2005.

BAB III
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN
PENYELENGGARAAN PILKADA

A. KPUD

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS KPUD
KABUPATEN GORONTALO

a.	Jumlah Belanja Pilkada menurut DASK	Rp 5.415.071.834,00	
b.	Jumlah penerimaan sampai saat pelaporan:		
	1) Jumlah Pengisian Kas (PK)	Rp 3.244.660.000,00	
	2) Jumlah Beban Tetap (BT)	Rp 796.978.500,00	
	Jumlah	Rp4.041.638.500,00	(+)
c.	Jumlah pengeluaran sampai saat pelaporan:		
	1) Jumlah Pengisian Kas (PK)	Rp3.163.625.923,00	
	2) Jumlah Beban Tetap (BT)	Rp 796.978.500,00	
	3) Panjar (UMK) ke pihak ketiga	Rp 0,00	
	Jumlah	Rp3.960.604.423,00	(-)
d.	Saldo/Sisa	Rp 81.034.077,00	
e.	Penerimaan dan penyetoran bukan Pajak (Jasa Giro dll)		
	1) Penerimaan (Jasa Giro dll)	Rp 0,00	
	2) Penyetoran (Jasa Giro dll) ke Kasda	Rp 0,00	
	Saldo/Sisa	Rp 0,00	(-)
f.	Penerimaan pemotongan dan penyetoran Pajak:		
	1) Penerimaan PPN/PPh	Rp 56.227.966,00	
	2) Penyetoran PPN/PPh ke Kas Negara	Rp 56.227.966,00	
	Saldo/Sisa	Rp 0,00	(-)
g.	Saldo/Sisa Buku pada tanggal pelaporan	Rp 81.034.077,00	
h.	Sisa Kas	Rp 73.334.077,00	
i.	Perbedaan positif/negatif	Rp 7.700.000,00	
j.	Perincian selisih		
	1) PPN/PPh yang belum disetor ke	Rp 0,00	
	2) Kesukaran uang kecil	Rp 0,00	
	3) Jasa Giro	Rp 0,00	
	4) SPM PK yang disetor kembali	Rp 7.700.000,00	
	Jumlah	Rp 7.700.000,00	(+)

**LAPORAN REALISASI BELANJA BARANG INVENTARIS/MODAL
KPU KABUPATEN GORONTALO**

NO	JENIS BARANG	MERK/ TYPE UKURAN	TGL/ NO/ KWINTANSI/ SPK / KONTRAK	JUMLAH PENGADAAN		JUMLAH (Rp)	PENGGUNA BARANG	KETERANGAN KEADAAN
				UNIT	SATUAN HARGA			
1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6	8	9
1 .	Palu Sidang	Ls	15.03.05/75/KPU- KAB/III/2005	1	150,000	150,000	KPU Kab Gtlo	Baik
2 .	Memory Comp	PDR VisiPro 256 MB PC 2700	15.03.05/76/KPU- KAB/III/2005	1	540,000	540,000	KPU Kab Gtlo	Baik
3 .	Antena		17.03.05/89/KPU- KAB/III/2005	1	55,000	55,000	KPU Kab Gtlo	Baik
4 .	Antena Larsen		17.03.05/90/KPU- KAB/III/2005	1	105,000	105,000	KPU Kab Gtlo	Baik
5 .	Tirai Jendela	Warna Kayu	18.03.05/100/KPU- KAB/III/2005	2	50,000	100,000	Media Center	Baik
6 .	Note Book	Acer Travelmate Dothan Lengkap	19.03.05/106/KPU- KAB/III/2005	1	16,315,400	16,315,400	KPU Kab Gtlo	Baik
7 .	Handphone	Nokia 3315	24.03.05/147/KPU- KAB/III/2005	2	500,000	1,000,000	Media Center	Baik
8 .	Telpon	KTX - T - 300	29.03.05/181/KPU- KAB/III/2005	2	60,000	120,000	Media Center	Baik
9 .	Vitaphone	KXT/16(191)	29.03.05/181/KPU- KAB/III/2005	1	150,000	150,000	KPU Kab Gtlo	Baik

**LAPORAN REALISASI BELANJA BARANG INVENTARIS/MODAL
KPUD KABUPATEN GORONTALO (bagian 2 dari 3)**

1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6	8	9
10 .	Dispenser	MT. 298	29.03.05/181/KP U-KAB/III/2005	1	250,000	250,000	Media Center	Baik
11 .	Gorden	Warna Merah muda	30.03.05/188/311/ KPU- KAB/III/2005	-	1,695,000	1,695,000	Media Center	Baik
12 .	Cok Roll	15 Meter	10.04.05/336/KP U-KAB/IV/2005	1	27,500	27,500	KPU Kab Gtlo	Baik
13 .	Papan Dokumentasi	Ls	20.04.05/373/KP U-KAB/IV/2005	1	54,000	54,000	Media Center	Baik
14 .	Papan Dokumentasi	Ls	20.04.05/374/KP U-KAB/IV/2005	1	63,500	63,500	Media Center	Baik
15 .	Keyboard Comp		11.05.05/447/KP U-KAB/V/2005	1	75,000	75,000	KPU Kab Gtlo	Baik
16 .	Tape Recorder	Panasonic. RQ.L11	12.05.05/472/KP U-KAB/V/2005	1	300,000	300,000	Media Center	Baik
17 .	Calculator	Cityzen,SDC 2602	20.06.05/854/KP U-KAB/VI/2005	1	150,000	150,000	KPU Kab Gtlo	Baik
18 .	Lemari Arsip	2 Badan	11.07.05/1056/KP U-KAB/VII/2005	1	750,000	750,000	KPU Kab Gtlo	Baik

**LAPORAN REALISASI BELANJA BARANG INVENTARIS/MODAL
KPU KABUPATEN GORONTALO (bagian 3 dari 3)**

1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6	8	9
19 .	Umbul - Umbul	Ls	11.07.05/1059/KPU-KAB/VII/2005	-	200,000	200,000	KPU Kab Gtlo	Baik
20 .	Flash Disk	Epraizer/128 MB	03.09.05/1133/KPU-KAB/IX/2005	1	230,000	230,000	KPU Kab Gtlo	Baik
J U M L A H						22,330,400		

LAPORAN REALISASI BELANJA BARANG PERSEDIAAN PAKAI HABIS PILKADA

KPUD KABUPATEN GORONTALO

NO	JENIS BARANG	MERK/TYPE UKURAN	TGL/NO/ KWITAN SI/ SPK/KON TRAK	JUMLAH PENGADAAN		JUMLAH (Rp)	PENGUN A BARAN G	PENGUN AAN (JUMLAH / UNIT)	SISA/ PERSED IAAN (UNIT)	KETERANGAN KEADAAN
				UNIT	HARGA SATUAN					
1	2	3	4	5	6	7=5X6	8	9	10=5-9	11
1.	SURAT SUARA PILKADA	UV. Dull 80 gram/ 26 x 18 Cm.	Tanggal 20 Mei 2005 No. 107/ KPU/SPMK /V/2005	284115	1,503	427,080,000	PEMILIH	281436	2679	
2.	SAMPUL KERTAS V.S.1	Ukuran 37x27 Cm	Tanggal 27 Mei 2005 No. 118/ KPU/SPMK /V/2005	725	1,000	725,000	KPPS	699	26	
3.	SAMPUL KERTAS V.S.2	Ukuran 37x27 Cm	Tanggal 27 Mei 2005 No. 118/ KPU/SPMK /V/2005	725	1,000	725,000	KPPS	699	26	
4.	SAMPUL KERTAS V.S.3	Ukuran 37x27 Cm	Tanggal 27 Mei 2005 No. 118/ KPU/SPMK /V/2005	725	1,000	725,000	KPPS	699	26	

LAPORAN REALISASI BELANJA BARANG PERSEDIAAN PAKAI HABIS PILKADA

KPUD KABUPATEN GORONTALO (bagian 2 dari 5)

1	2	3	4	5	6	7=5X6	8	9	10=5-9	11
5.	SAMPUL KERTAS V.S.4	Ukuran 37x27 Cm	Tanggal 27 Mei 2005 No. 118/ KPU/SPMK /V/2005	2175	1,000	2,175,000	KPPS	2097	78	
6.	SAMPUL KERTAS IV.S.1	Ukuran 37x27 Cm	Tanggal 27 Mei 2005 No. 118/ KPU/SPMK /V/2005	210	1,000	210,000	PPS	199	11	
7.	SAMPUL KERTAS III.S.1	Ukuran 37x27 Cm	Tanggal 27 Mei 2005 No. 118/ KPU/SPMK /V/2005	20	1,000	20,000	PPK	17	3	
8.	SEGEL PEMILU	Ukuran 55.5 x 7.5 Cm	Tanggal 27 Mei 2005 No. 118/ KPU/SPMK /V/2005	11000	500	5,500,000	KPPS,PPS ,PPK	10917	83	
9.	LEM PEREKAT	Hakol / Reg 403341	Tanggal 27 Mei 2005 No. 119/KPU/S PMK/V/20 05	700	1,114	779,450	KPPS	699	1	

LAPORAN REALISASI BELANJA BARANG PERSEDIAAN PAKAI HABIS PILKADA

KPUD KABUPATEN GORONTALO (bagian 3 dari 5)

1	2	3	4	5	6	7=5X6	8	9	10=5-9	11
10.	KANTONG PLASTIK	Warna Putih	Tanggal 27 Mei 2005 No. 119/ KPU/SPMK /V/2005	700	334	233,835	KPPS	699	1	
11.	KARET/ TALI PENGIKAT	Ayam Bangkok / 500 gram	Tanggal 27 Mei 2005 No. 119/ KPU/SPMK /V/2005	50	30,621	1,531,062	KPPS	30	20	
12.	SPIDOL	Tabata Marker Permanent	Tanggal 27 Mei 2005 No. 119/ KPU/SPMK /V/2005	1620	4,176	6,764,512	KPPS,PPS ,PPK	1614	6	
13.	BALLPOINT	Standar AE-7 FINE	Tanggal 27 Mei 2005 No. 119/ KPU/SPMK /V/2005	1620	2,227	3,607,740	KPPS,PPS ,PPK	1614	6	
14.	ALAS PENCOBLOS		Tanggal 27 Mei 2005 No. 119/ KPU/SPMK /V/2006	3500	2,227	7,794,500	KPPS	3495	5	

LAPORAN REALISASI BELANJA BARANG PERSEDIAAN PAKAI HABIS PILKADA

KPU KABUPATEN GORONTALO (bagian 4 dari 5)

1	2	3	4	5	6	7=5X6	8	9	10=5-9	11
15.	TANDA KHUSUS / TINTA	Tinta Sidik Jari/ 40 ml	Tanggal 27 Mei 2005 No. 120/ KPU/SPMK /V/2007	1000	23,550	23,550,000	KPPS	952	48	
16.	STIKER KOTAK SUARA		Tanggal 27 Mei 2005 No. 119/ KPU/SPMK /V/2008	725	1,114	807,288	KPPS	699	26	
17.	GAMBAR PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		Tanggal 27 Mei 2005 No. 118/ KPU/SPMK /V/2008	725	3,000	2,175,000	KPPS	699	26	
18.	FORMULIR SERI C1,C3,C4,C5,C8 - KWK	Sinar Dunia/CF4 60 GSM/21.5 x 33.0 cm	Tanggal 27 Mei 2005 No. 118/ KPU/SPMK /V/2008	47850	150	7,177,500	KPPS	46134	1716	
19.	FORMULIR SERI C6 - KWK	Sinar Dunia/CF4 60 GSM/21.5 x 33.0 cm	Tanggal 27 Mei 2005 No. 118/ KPU/SPMK /V/2008	281500	150	42,225,000	KPPS	274572	6928	

LAPORAN REALISASI BELANJA BARANG PERSEDIAAN PAKAI HABIS PILKADA

KPUD KABUPATEN GORONTALO (bagian 5 dari 5)

1	2	3	4	5	6	7=5X6	8	9	10=5-9	11
20.	FORMULIR SERI C7 - KWK	Sinar Dunia/CF4 60 GSM/21.5 x 33.0 cm	Tanggal 27 Mei 2005 No. 118/ KPU/SPMK /V/2008	7000	150	1,050,000	KPPS	6990	10	
21.	FORMULIR SERI C9 - KWK	Sinar Dunia/CF4 60 GSM/21.5 x 33.0 cm	Tanggal 27 Mei 2005 No. 118/ KPU/SPMK /V/2008	1400	150	210,000	KPPS	1398	2	
22.	FORMULIR SERI C2 BESAR - KWK		Tanggal 20 Mei 2005 No. 107/ KPU/SPMK /V/2005	725	4,460	3,233,500	KPPS	699	26	
23.	KARTU PEMILIH	BC. 150 gram/ 54 mm x 86 mm	Tanggal 20 Mei 2005 No. 106/ KPU/SPMK /V/2005	281500	1,000	281,478,000	PEMILIH	274572	6928	
24.	FORMULIR MODEL A - KWK	Sinar Dunia/CF4 60 GSM/21.5 x 33.0 cm	Tanggal 22 Maret 2005 No. 120/ 2.1b/KPU- KAB/III/20 05	248600	144	35,860,500	PPS	226155	22445	
JUMLAH						855,637,887				

LAPORAN REALISASI PENGADAAN DAN PENGGUNAAN JASA PILKADA

KPUD KABUPATEN GORONTALO

NO	JENIS PENGADAAN/ PENGGUNAAN JASA	PENYEDIA JASA	TGL/NO. KWINTANSI/ SPK/ KONTRAK	JUMLAH PENGADAAN/ PENGGUNAAN JASA		JUMLAH (Rp)	PENGGUNA JASA	KETERANGAN
				UNIT/ ORG/ FREKWENSI/ WAKTU	HARGA SATUAN (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6	8	9
1.	FORMULIR MODEL A	Percetakan Syahdila	Tanggal 22 Maret 2005/ No. 120/2.1b/KPU- KAB/III/2005	248600	144	35,860,500	KPU	
2.	<ul style="list-style-type: none"> • SURAT SUARA • FORMULIR C2 BESAR 	PT. Grafindo Megah Utama.	Tanggal 20 Mei 2005 No. 107/KPU/SPMK /V/2005	284115	1,503	427,080,000	KPU	
				725	4,460	3,233,500	KPU	
3.	KIP	PT. Puji Rahayu	Tanggal 20 Mei 2005 No. 106/KPU/SPMK /V/2005	281500	1,000	281,478,000	KPU	
4.	<ul style="list-style-type: none"> • FORMULIR • SEGEL • SAMPUL • DAFTAR CALON 	CV. Raya Guna	Tanggal 27 Mei 2005 No. 118/KPU/SPMK /V/2005	350770	150	52,615,500	KPU	
				11000	500	5,500,000	KPU	
				4580	1,000	4,580,000	KPU	
				725	3,000	2,175,000	KPU	

LAPORAN REALISASI PENGADAAN DAN PENGGUNAAN JASA PILKADA

KPUD KABUPATEN GORONTALO (bagian 2 dari 2)

1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6	8	9
5.	TINTA SIDIK JARI	PT. Benda Utama	Tanggal 27 Mei 2005 No. 120/KPU/SPMK/V/2005	1000	23,550	23,550,000	KPU	
6	PERLENGAKPAN TPS	CV. Yuriko	Tanggal 27 Mei 2005 No. 119/KPU/SPMK/V/2005		-	33,427,882	KPU	
JUMLAH						869,500,382		

**BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG INVENTARIS
DAN SISA BARANG PERSEDIAAN
PELAKSANAAN PILKADA 2005 KEPADA PEMERINTAH DAERAH
KPUD KABUPATEN GORONTALO**

(tidak ada Berita Acara Penyerahan Barang)

B. PANWAS**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PANWAS
KABUPATEN GORONTALO.**

a. Jumlah Belanja Pilkada menurut DASK	Rp	632.723.000,00	
b. Jumlah penerimaan sampai saat pelaporan:			
1) Jumlah Pengisian Kas (PK)	Rp	575.535.000,00	
2) Jumlah Beban Tetap (BT)	Rp	0,00	
		<u> </u>	(+)
Jumlah			Rp 575.535.000,00
c. Jumlah pengeluaran sampai saat pelaporan:			
1) Jumlah Pengisian Kas (PK)	Rp	0,00	
2) Jumlah Beban Tetap (BT)	Rp	575.535.000,00	
3) Panjar (UMK) ke pihak ketiga	Rp	0,00	
		<u> </u>	(+)
Jumlah			Rp 575.535.000,00 (-)
d. Saldo/Sisa	Rp		0,00
e. Penerimaan dan penyetoran bukan Pajak (Jasa Giro dll)			
1) Penerimaan (Jasa Giro dll)	Rp	0,00	
2) Penyetoran (Jasa Giro dll) ke Kasda	Rp	0,00	
Saldo/Sisa	Rp	<u> </u>	(-)
f. Penerimaan pemotongan dan penyetoran Pajak:			
1) Penerimaan PPN/PPH	Rp	6.263.500,00	
2) Penyetoran PPN/PPH ke Kas Negara	Rp	6.263.500,00	
Saldo/Sisa		<u> </u>	(-) Rp 0,00 (-)
g. Saldo/Sisa Buku pada tanggal pelaporan	Rp		0,00
h. Sisa Kas	Rp		<u> </u> 0,00
i. Perbedaan positif/negatif	Rp		0,00
j. Perincian selisih			
5) PPN/PPH yang belum disetor ke	Rp	0,00	
6) Kesukaran uang kecil	Rp	0,00	
7) Jasa Giro	Rp	.0,00	
8) -	Rp	-	
		<u> </u>	(+)
Jumlah	Rp		0,00

**LAPORAN REALISASI BELANJA BARANG INVENTARIS/MODAL
PANWAS KABUPATEN GORONTALO**

NO	JENIS BARANG	MERK/TYPE UKURAN	TGL/NO/KWITANSI/ SPK/KONTRAK/	JUMLAH PENGADAAN		JUMLAH (Rp)	PENGGUNA BARANG	KETERANGAN KEADAAN
				UNIT	HARGA SATUAN			
1	2	3	4	5	6	7=5X6	8	9
-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH						0,00		

**LAPORAN REALISASI PENGADAAN DAN PENGGUNAAN JASA PILKADA
PANWAS KABUPATEN GORONTALO**

NO	JENIS PENGADAAN/ PENGGUNAAN JASA	PENYEDIA JASA	TGL/ NO. KWINTANSI/ SPK/ KONTRAK	JUMLAH PENGADAAN/ PENGGUNAAN JASA		JUMLAH (Rp)	PENGGUNA JASA	KETERANGAN
				UNIT/ ORG/ FREKWENSI/ WAKTU	HARGA SATUAN (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7 = 5 X 6	8	9
1.	Dispenser	Toko Citra	31/Keu/Pnws- Pk/Kab.Gtlo/05	1	600,000	600,000	Panwas Kab	
JUMLAH						600,000		

SALINAN
BERITA ACARA NOMOR. 024 / PANWAS – PK / 98 / 2005
TENTANG
PENYERAHAN BARANG INVENTARIS PANWAS PILKADA

Pada hari ini Senin Tanggal Tiga Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Lima, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Nama : Drs. SAFWAN T. BANO
Jabatan : Ketua PANWAS Pilkada Kab. Gorontalo
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : Drs. RIDWAN LUKUM
Jabatan : Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Gorontalo
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa PIHAK PERTAMA menyerahkan berupa barang inventaris Panwas Pilkada Kabupaten Gorontalo terdiri dari :

- 4 (empat) buah Tape Recorder Merek Aiwa TP – A 200
- 1 (satu) buah Tape Recorder Sony
- 1 (satu) buah Camera Digital Merk Sony
- 1 (satu) buah Handy Cam Merk Sony DCR-HC 21 E
- 1 (satu) buah TV 20” Merk Samsung
- 1 (satu) buah Faxmile Merk Panasonic
- 1 (satu) buah Tape Radio Merk Panasonic
- 2 (Dua) buah Kendaraan Roda Dua Merek Beijing Type Winer
- 2 (Dua) Unit Komputer.

Bahwa Pihak Kedua telah menerima barang tersebut dalam keadaan baik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipertanggung jawabkan oleh kedua belah pihak.

Yang Menerima,
Drs. RIDWAN LUKUM

Yang Menyerahkan,
Drs. SAFWAN T. BANO

Mengetahui :
ASISTEN ADMINISTRASI
IDRAK HIOLA, BSc.
Nip. 560 007 254

LAMPIRAN I

Daftar Biaya Perjalanan Dinas yang Melebihi Ketentuan

No.	No. BKU	Tanggal Pembayaran	Atas Nama	Jabatan	Gol	Ese lon	No. SPPD	Tgl. SPPD	Tujuan	Tgl. Pergi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	153	26 Mar 2005	Salahudin Pakaya, S.Ag.	Ketua KPU	NA	II	37/KPU-KAB/III/2005	26 Mar 2005	Jakarta	28 Mar 2005
2	153	26 Mar 2005	Ir. Rully Henga	Anggota KPU	NA	II	38/KPU-KAB/III/2005	26 Mar 2005	Jakarta	28 Mar 2005
3	153	26 Mar 2005	Subhan Yunus Ibrahim, S.I.P.	Anggota KPU	NA	II	39/KPU-KAB/III/2005	26 Mar 2005	Jakarta	28 Mar 2005
4	353	16 Apr 2005	Drs. Djamaluddin Daeng Mile	Ksb Tek. Peny.	III/c		62/KPU-KAB/IV/2005	16 Apr 2005	Jakarta	16 Apr 2005
5	607	30 Mei 2005	Sukri Moonti, S.H., M.H.	Ksb Umum Set. KPU	III/c		81/KPU-KAB/V/2005	30 Mei 2005	Jakarta	-
6	609	31 Mei 2005	Ir. Wawan K. Tolinggi	Anggota KPU	NA	II	82/KPU-KAB/V/2005	31 Mei 2005	Jakarta	-
7	1106	26 Jul 2005	Husni A. Deka, S.Sos.	Sekretaris KPU	IV/a		26/KPU-KAB/VII/2005	26 Jul 2005	Jakarta	27 Jul 2005
8	1107	26 Jul 2005	Atmin Latif	Bend. Set. KPU	III/a		164/KPU-KAB/VII/2005	26 Jul 2005	Jakarta	27 Jul 2005
9	1108	26 Jul 2005	Subhan Yunus Ibrahim, S.I.P.	Anggota KPU	NA	II	161/KPU-KAB/VII/2005	27 Jul 2005	Jakarta	26 Jul 2005

LAMPIRAN I

Daftar Biaya Perjalanan Dinas yang Melebihi Ketentuan (Bagian 2 dari 2)

No.	Tgl. Pulang	Hari PD	Total Pem bayaran	Lumpsum per hari	Total Lumpsum (15x13)	Lumpsum per hari KMK	Repre sentasi KMK	Total per hari KMK (17+18)	Total Lumpsum KMK (19x13)	Sel isih (16-20)
1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	31 Mar 2005	4	4.500.000	575.000	2.300.000	300.000	200.000	500.000	2.000.000	300.000
2	31 Mar 2005	4	4.500.000	575.000	2.300.000	300.000	200.000	500.000	2.000.000	300.000
3	31 Mar 2005	4	4.500.000	575.000	2.300.000	300.000	200.000	500.000	2.000.000	300.000
4	21 Apr 2005	6	5.250.000	475.000	2.850.000	260.000	-	260.000	1.560.000	1.290.000
5	-	6	5.916.400	475.000	2.850.000	260.000	-	260.000	1.560.000	1.290.000
6	-	5	5.675.000	575.000	2.875.000	300.000	200.000	500.000	2.500.000	375.000
7	31 Jul 2005	5	6.900.000	575.000	2.875.000	300.000	-	300.000	1.500.000	1.375.000
8	29 Jul 2005	3	1.425.000	475.000	1.425.000	260.000	-	260.000	780.000	645.000
9	28 Jul 2005	3	4.525.000	575.000	1.725.000	300.000	200.000	500.000	1.500.000	225.000
	TOTAL		43.191.400		21.500.000				15.400.000	6.100.000

LAMPIRAN II

REKAPITULASI PEMBAYARAN UANG HONOR, LEMBUR, INSENTIF KPUD KAB. GORONTALO BULAN MARET TA 2005

No.	Tanggal Pembayaran	Nama	Jabatan	Gol	Tanda Terima Pembayaran	Jenis	Uang Honor, Lembur, Insentif	PPH Pasal 21 Dibayarkan	PPH Pasal 21 Seharusnya (15 %)	Jumlah Kurang Dipungut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	10 Mar 2005	Salahudin Pakaya, S.Ag.	Ketua KPU	NA	57/KPU-KAB/III/2005	Insentif	3,000,000	300,000	450,000	150,000
2	10 Mar 2005	Ir. Rully Henga	Anggota KPU	NA	57/KPU-KAB/III/2005	Insentif	2,500,000	250,000	375,000	125,000
3	10 Mar 2005	Obow Bakar Mohamad Ali, S.E.	Anggota KPU	NA	57/KPU-KAB/III/2005	Insentif	2,500,000	250,000	375,000	125,000
4	10 Mar 2005	Ir. Wawan K. Tolinggi	Anggota KPU	NA	57/KPU-KAB/III/2005	Insentif	2,500,000	250,000	375,000	125,000
5	10 Mar 2005	Subhan Yunus Ibrahim, S.I.P.	Anggota KPU	NA	57/KPU-KAB/III/2005	Insentif	2,500,000	250,000	375,000	125,000
6	10 Mar 2005	Husni A. Deka, S.Sos.	Sekretaris KPU	IV/a	59/KPU-KAB/III/2005	Insentif	500,000	50,000	75,000	25,000
7	10 Mar 2005	Sukri Moonti, S.H., M.H.	Ksb Umum Set. KPU	III/c	59/KPU-KAB/III/2005	Insentif	400,000	40,000	60,000	20,000
8	10 Mar 2005	Drs. Djamaluddin Daeng Mile	Ksb Tek. Peny.	III/c	59/KPU-KAB/III/2005	Insentif	400,000	40,000	60,000	20,000
9	10 Mar 2005	Yahya Lamatenggo	Ksb Program	III/c	59/KPU-KAB/III/2005	Insentif	400,000	40,000	60,000	20,000
10	10 Mar 2005	Fatma Tuna, S.Ag.	Ksb Huk. dan Humas	III/b	59/KPU-KAB/III/2005	Insentif	400,000	40,000	60,000	20,000
11	10 Mar 2005	Haryanto Imran, S.E.	Bend. Set. KPU	III/a	59/KPU-KAB/III/2005	Insentif	275,000	27,500	41,250	13,750
12	10 Mar 2005	Hasni D. Lamanasa, S.T.P.	Staff Set. KPU	III/a	59/KPU-KAB/III/2005	Insentif	200,000	20,000	30,000	10,000
13	10 Mar 2005	Nurhayati Buluati, S.Sos.	Staff Set. KPU	III/a	59/KPU-KAB/III/2005	Insentif	200,000	20,000	30,000	10,000
14	10 Mar 2005	Risman K. Umar, S.Sos.	Staff Set. KPU	III/a	59/KPU-KAB/III/2005	Insentif	200,000	20,000	30,000	10,000
15	10 Mar 2005	Subanrio Maliki, A. Ma. Ak.	Staff Set. KPU	II/d	59/KPU-KAB/III/2005	Insentif	200,000	-	-	-
16	10 Mar 2005	Atmin Latif	Bend. Set. KPU	III/a	59/KPU-KAB/III/2005	Insentif	200,000	-	30,000	30,000
17	10 Mar 2005	Olan Ishak Yantiko	Staff Set. KPU	II/c	59/KPU-KAB/III/2005	Insentif	200,000	-	-	-
18	10 Mar 2005	Suherdi Pou	Staff Set. KPU	II/c	59/KPU-KAB/III/2005	Insentif	200,000	-	-	-
19	10 Mar 2005	Mansur Usman	Staff Set. KPU	II/b	59/KPU-KAB/III/2005	Insentif	200,000	-	-	-
20	10 Mar 2005	Irmayanti Rifai	Staff Set. KPU	II/b	59/KPU-KAB/III/2005	Insentif	200,000	-	-	-
21	10 Mar 2005	Wahab Kau	Staff Set. KPU	II/a	59/KPU-KAB/III/2005	Insentif	200,000	-	-	-
22	10 Mar 2005	Farid Wolinga	Staff Set. KPU	II/a	59/KPU-KAB/III/2005	Insentif	200,000	-	-	-
23	10 Mar 2005	Nurjamal Dasa Prawiranegara	Staff Set. KPU	II/a	59/KPU-KAB/III/2005	Insentif	200,000	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	16 Mar 2005	Salahudin Pakaya, S.Ag.	Ketua KPU	NA	84/3.2/KPU-KAB/III/2005	Honor	675,000	67,500	101,250	33,750
25	16 Mar 2005	Obow Bakar Mohamad Ali, S.E.	Anggota KPU	NA	84/3.2/KPU-KAB/III/2005	Honor	675,000	67,500	101,250	33,750
26	16 Mar 2005	Ir. Wawan K. Tolinggi	Anggota KPU	NA	84/3.2/KPU-KAB/III/2005	Honor	675,000	67,500	101,250	33,750
27	16 Mar 2005	Subhan Yunus Ibrahim, S.I.P.	Anggota KPU	NA	84/3.2/KPU-KAB/III/2005	Honor	600,000	60,000	90,000	30,000
28	16 Mar 2005	Ir. Rully Henga	Anggota KPU	NA	84/3.2/KPU-KAB/III/2005	Honor	600,000	60,000	90,000	30,000
29	16 Mar 2005	Sukri Moonti, S.H., M.H.	Ksb Umum Set. KPU	III/c	84/3.2/KPU-KAB/III/2005	Honor	600,000	60,000	90,000	30,000
30	16 Mar 2005	Drs. Djamaluddin Daeng Mile	Ksb Tek. Peny.	III/c	84/3.2/KPU-KAB/III/2005	Honor	600,000	60,000	90,000	30,000
31	16 Mar 2005	Fatma Tuna, S.Ag.	Ksb Huk. dan Humas	III/b	84/3.2/KPU-KAB/III/2005	Honor	675,000	67,500	101,250	33,750
32	23 Mar 2005	Salahudin Pakaya, S.Ag.	Ketua KPU	NA	137/3.6.c/KPU-KAB/III/2005	Insentif	250,000	25,000	37,500	12,500
33	23 Mar 2005	Ir. Wawan K. Tolinggi	Anggota KPU	NA	137/3.6.c/KPU-KAB/III/2005	Insentif	250,000	25,000	37,500	12,500
34	23 Mar 2005	Obow Bakar Mohamad Ali, S.E.	Anggota KPU	NA	137/3.6.c/KPU-KAB/III/2005	Insentif	250,000	25,000	37,500	12,500
35	23 Mar 2005	Subhan Yunus Ibrahim, S.I.P.	Anggota KPU	NA	137/3.6.c/KPU-KAB/III/2005	Insentif	250,000	25,000	37,500	12,500
36	23 Mar 2005	Ir. Rully Henga	Anggota KPU	NA	137/3.6.c/KPU-KAB/III/2005	Insentif	250,000	25,000	37,500	12,500
37	23 Mar 2005	Husni A. Deka, S.Sos.	Sekretaris KPU	IV/a	137/3.6.c/KPU-KAB/III/2005	Insentif	250,000	25,000	37,500	12,500
38	23 Mar 2005	Sukri Moonti, S.H., M.H.	Ksb Umum Set. KPU	III/c	137/3.6.c/KPU-KAB/III/2005	Insentif	250,000	25,000	37,500	12,500
39	23 Mar 2005	Drs. Djamaluddin Daeng Mile	Ksb Tek. Peny.	III/c	137/3.6.c/KPU-KAB/III/2005	Insentif	250,000	25,000	37,500	12,500
40	23 Mar 2005	Husni A. Deka, S.Sos.	Sekretaris KPU	IV/a	138/3.6.c/KPU-KAB/III/2005	Honor	300,000	30,000	45,000	15,000
41	23 Mar 2005	Sukri Moonti, S.H., M.H.	Ksb Umum Set. KPU	III/c	138/3.6.c/KPU-KAB/III/2005	Honor	275,000	27,500	41,250	13,750
42	23 Mar 2005	Drs. Djamaluddin Daeng Mile	Ksb Tek. Peny.	III/c	138/3.6.c/KPU-KAB/III/2005	Honor	275,000	27,500	41,250	13,750
43	23 Mar 2005	Fatma Tuna, S.Ag.	Ksb Huk. dan Humas	III/b	138/3.6.c/KPU-KAB/III/2005	Honor	200,000	20,000	30,000	10,000
44	23 Mar 2005	Yusuf Tomayahu, S.H.	Staff Set. KPU	III/a	138/3.6.c/KPU-KAB/III/2005	Honor	150,000	15,000	22,500	7,500
45	23 Mar 2005	Risman K. Umar, S.Sos.	Staff Set. KPU	III/a	138/3.6.c/KPU-KAB/III/2005	Honor	150,000	15,000	22,500	7,500
46	23 Mar 2005	Nurhayati Buluati, S.Sos.	Staff Set. KPU	III/a	138/3.6.c/KPU-KAB/III/2005	Honor	150,000	15,000	22,500	7,500
47	23 Mar 2005	Mansur Usman	Staff Set. KPU	II/b	138/3.6.c/KPU-KAB/III/2005	Honor	150,000	-	-	-
48	23 Mar 2005	Yahya Lamatenggo	Ksb Program	III/c	138/3.6.c/KPU-KAB/III/2005	Honor	200,000	20,000	30,000	10,000
49	23 Mar 2005	Haryanto Imran, S.E.	Bend. Set. KPU	III/a	138/3.6.c/KPU-KAB/III/2005	Honor	150,000	15,000	22,500	7,500

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50	23 Mar 2005	Maylan Tongkodu, S.Kom.	Staff Set. KPU	III/a	138/3.6.c/KPU-KAB/III/2005	Honor	150,000	15,000	22,500	7,500
51	23 Mar 2005	Atmin Latif	Bend. Set. KPU	III/a	138/3.6.c/KPU-KAB/III/2005	Honor	150,000	-	22,500	22,500
52	23 Mar 2005	Subanrio Maliki, A. Ma. Ak.	Staff Set. KPU	II/d	138/3.6.c/KPU-KAB/III/2005	Honor	150,000	-	-	-
53	23 Mar 2005	Farid Wolinga	Staff Set. KPU	II/a	138/3.6.c/KPU-KAB/III/2005	Honor	150,000	-	-	-
54	26 Mar 2005	Ir. Wawan K. Tolinggi	Anggota KPU	NA	154/KPU-KAB/III/2005	Honor	400,000	40,000	60,000	20,000
55	26 Mar 2005	Drs. Djamaluddin Daeng Mile	Ksb Tek. Peny.	III/c	154/KPU-KAB/III/2005	Honor	400,000	40,000	60,000	20,000
56	26 Mar 2005	Nurhayati Buluati, S.Sos.	Staff Set. KPU	III/a	154/KPU-KAB/III/2005	Honor	275,000	27,500	41,250	13,750
57	26 Mar 2005	Risman K. Umar, S.Sos.	Staff Set. KPU	III/a	154/KPU-KAB/III/2005	Honor	275,000	27,500	41,250	13,750
58	26 Mar 2005	Suherdi Pou	Staff Set. KPU	II/c	154/KPU-KAB/III/2005	Honor	275,000	-	-	-
59	26 Mar 2005	Obow Bakar Mohamad Ali, S.E.	Anggota KPU	NA	156/KPU-KAB/III/2005	Honor	650,000	65,000	97,500	32,500
60	26 Mar 2005	Husni A. Deka, S.Sos.	Sekretaris KPU	IV/a	156/KPU-KAB/III/2005	Honor	650,000	65,000	97,500	32,500
61	26 Mar 2005	Sukri Moonti, S.H., M.H.	Ksb Umum Set. KPU	III/c	156/KPU-KAB/III/2005	Honor	600,000	60,000	90,000	30,000
62	26 Mar 2005	Drs. Djamaluddin Daeng Mile	Ksb Tek. Peny.	III/c	156/KPU-KAB/III/2005	Honor	600,000	60,000	90,000	30,000
63	26 Mar 2005	Fatma Tuna, S.Ag.	Ksb Huk. dan Humas	III/b	156/KPU-KAB/III/2005	Honor	600,000	60,000	90,000	30,000
64	26 Mar 2005	Yusuf Tomayahu, S.H.	Staff Set. KPU	III/a	156/KPU-KAB/III/2005	Honor	600,000	60,000	90,000	30,000
65	26 Mar 2005	Hasni D. Lamanasa, S.T.P.	Staff Set. KPU	III/a	156/KPU-KAB/III/2005	Honor	600,000	60,000	90,000	30,000
66	26 Mar 2005	Husna Tilahunga	#N/A	#N/A	156/KPU-KAB/III/2005	Honor	500,000	-	-	-
67	31 Mar 2005	Husni A. Deka, S.Sos.	Sekretaris KPU	IV/a	25/1.2/KPU-KAB/III/2005	Lembur	125,000	12,500	18,750	6,250
68	31 Mar 2005	Sukri Moonti, S.H., M.H.	Ksb Umum Set. KPU	III/c	25/1.2/KPU-KAB/III/2005	Lembur	125,000	12,500	18,750	6,250
69	31 Mar 2005	Drs. Djamaluddin Daeng Mile	Ksb Tek. Peny.	III/c	25/1.2/KPU-KAB/III/2005	Lembur	125,000	12,500	18,750	6,250
70	31 Mar 2005	Yahya Lamatenggo	Ksb Program	III/c	25/1.2/KPU-KAB/III/2005	Lembur	125,000	12,500	18,750	6,250
71	31 Mar 2005	Fatma Tuna, S.Ag.	Ksb Huk. dan Humas	III/b	25/1.2/KPU-KAB/III/2005	Lembur	125,000	12,500	18,750	6,250
72	31 Mar 2005	Hasni D. Lamanasa, S.T.P.	Staff Set. KPU	III/a	25/1.2/KPU-KAB/III/2005	Lembur	125,000	12,500	18,750	6,250
73	31 Mar 2005	Haryanto Imran, S.E.	Bend. Set. KPU	III/a	25/1.2/KPU-KAB/III/2005	Lembur	125,000	12,500	18,750	6,250
74	31 Mar 2005	Nurhayati Buluati, S.Sos.	Staff Set. KPU	III/a	25/1.2/KPU-KAB/III/2005	Lembur	125,000	12,500	18,750	6,250
75	31 Mar 2005	Risman K. Umar, S.Sos.	Staff Set. KPU	III/a	25/1.2/KPU-KAB/III/2005	Lembur	125,000	12,500	18,750	6,250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
76	31 Mar 2005	Subanrio Maliki, A. Ma. Ak.	Staff Set. KPU	II/d	25/1.2/KPU-KAB/III/2005	Lembur	125,000	-	-	-
77	31 Mar 2005	Atmin Latif	Bend. Set. KPU	III/a	25/1.2/KPU-KAB/III/2005	Lembur	125,000	-	18,750	18,750
78	31 Mar 2005	Olan Ishak Yantiko	Staff Set. KPU	II/c	25/1.2/KPU-KAB/III/2005	Lembur	125,000	-	-	-
79	31 Mar 2005	Suherdi Pou	Staff Set. KPU	II/c	25/1.2/KPU-KAB/III/2005	Lembur	125,000	-	-	-
80	31 Mar 2005	Mansur Usman	Staff Set. KPU	II/b	25/1.2/KPU-KAB/III/2005	Lembur	125,000	-	-	-
81	31 Mar 2005	Irmayanti Rifai	Staff Set. KPU	II/b	25/1.2/KPU-KAB/III/2005	Lembur	125,000	-	-	-
82	31 Mar 2005	Wahab Kau	Staff Set. KPU	II/a	25/1.2/KPU-KAB/III/2005	Lembur	125,000	-	-	-
83	31 Mar 2005	Farid Wolinga	Staff Set. KPU	II/a	25/1.2/KPU-KAB/III/2005	Lembur	125,000	-	-	-
84	31 Mar 2005	Nurjamal Dasa Prawiranegara	Staff Set. KPU	II/a	25/1.2/KPU-KAB/III/2005	Lembur	125,000	-	-	-
85	31 Mar 2005	Abdurrahman Pakaya, B.B.A.	Honorar	-	25/1.2/KPU-KAB/III/2005	Lembur	87,500	-	-	-
86	31 Mar 2005	Andi Mulyadi Daud	Honorar	-	25/1.2/KPU-KAB/III/2005	Lembur	87,500	-	-	-
87	31 Mar 2005	Rahma Saleh, S.Pd.	Honorar	-	25/1.2/KPU-KAB/III/2005	Lembur	87,500	-	-	-
88	31 Mar 2005	Friyanto Hatibie	Honorar	-	25/1.2/KPU-KAB/III/2005	Lembur	87,500	-	-	-
89	31 Mar 2005	Andi Ulfa Abd. Aziz, A.Md.	Honorar	-	25/1.2/KPU-KAB/III/2005	Lembur	87,500	-	-	-
									-	-
									-	-
									-	-
		JUMLAH					36,587,500	3,185,000		1,663,750

REKAPITULASI PEMBAYARAN UANG HONOR, LEMBUR, INSENTIF KPUD KAB. GORONTALO BULAN APRIL TA 2005

No.	Tanggal Pembayaran	Nama	Jabatan	Gol	Tanda Terima Pembayaran	Jenis	Uang Honor, Lembur, Insentif	PPh Pasal 21 Dibayarkan	PPh Pasal 21 Seharusnya (15 %)	Jumlah Kurang Dipungut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	02 Apr 2005	Salahudin Pakaya, S.Ag.	Ketua KPU	NA	259/KPU-KAB/IV/2005	Insentif	3,000,000	300,000	450,000	150,000
2	02 Apr 2005	Ir. Rully Henga	Anggota KPU	NA	259/KPU-KAB/IV/2005	Insentif	2,500,000	250,000	375,000	125,000
3	02 Apr 2005	Obow Bakar Mohamad Ali, S.E.	Anggota KPU	NA	259/KPU-KAB/IV/2005	Insentif	2,500,000	250,000	375,000	125,000
4	02 Apr 2005	Ir. Wawan K. Tolinggi	Anggota KPU	NA	259/KPU-KAB/IV/2005	Insentif	2,500,000	250,000	375,000	125,000
5	02 Apr 2005	Subhan Yunus Ibrahim, S.I.P.	Anggota KPU	NA	259/KPU-KAB/IV/2005	Insentif	2,500,000	250,000	375,000	125,000
6	02 Apr 2005	Abdurrahman Pakaya, B.B.A.	Honorar	-	261/KPU-KAB/IV/2005	Insentif	150,000	-	-	-
7	02 Apr 2005	Andi Mulyadi Daud	Honorar	-	261/KPU-KAB/IV/2005	Insentif	150,000	-	-	-
8	02 Apr 2005	Rahma Saleh, S.Pd.	Honorar	-	261/KPU-KAB/IV/2005	Insentif	150,000	-	-	-
9	02 Apr 2005	Friyanto Hatibie	Honorar	-	261/KPU-KAB/IV/2005	Insentif	150,000	-	-	-
10	02 Apr 2005	Andi Ulfa Abd. Aziz, A.Md.	Honorar	-	261/KPU-KAB/IV/2005	Insentif	150,000	-	-	-
11	06 Apr 2005	Obow Bakar Mohamad Ali, S.E.	Anggota KPU	NA	288/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
12	06 Apr 2005	Ir. Rully Henga	Anggota KPU	NA	288/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
13	06 Apr 2005	Husni A. Deka, S.Sos.	Sekretaris KPU	IV/a	288/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
14	06 Apr 2005	Drs. Djamaluddin Daeng Mile	Ksb Tek. Peny.	III/c	288/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
15	06 Apr 2005	Obow Bakar Mohamad Ali, S.E.	Anggota KPU	NA	290/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
16	06 Apr 2005	Ir. Rully Henga	Anggota KPU	NA	290/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
17	06 Apr 2005	Husni A. Deka, S.Sos.	Sekretaris KPU	IV/a	290/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
18	06 Apr 2005	Drs. Djamaluddin Daeng Mile	Ksb Tek. Peny.	III/c	290/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
19	06 Apr 2005	Salahudin Pakaya, S.Ag.	Ketua KPU	NA	292/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
20	06 Apr 2005	Ir. Wawan K. Tolinggi	Anggota KPU	NA	292/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
21	06 Apr 2005	Subhan Yunus Ibrahim, S.I.P.	Anggota KPU	NA	292/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
22	06 Apr 2005	Sukri Moonti, S.H., M.H.	Ksb Umum Set. KPU	III/c	292/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
23	06 Apr 2005	Salahudin Pakaya, S.Ag.	Ketua KPU	NA	294/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
24	06 Apr 2005	Ir. Wawan K. Tolinggi	Anggota KPU	NA	294/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750

25	06 Apr 2005	Subhan Yunus Ibrahim, S.I.P.	Anggota KPU	NA	294/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
26	06 Apr 2005	Sukri Moonti, S.H., M.H.	Ksb Umum Set. KPU	III/c	294/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
27	06 Apr 2005	Obow Bakar Mohamad Ali, S.E.	Anggota KPU	NA	296/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
28	06 Apr 2005	Ir. Rully Henga	Anggota KPU	NA	296/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
29	06 Apr 2005	Husni A. Deka, S.Sos.	Sekretaris KPU	IV/a	296/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
30	06 Apr 2005	Drs. Djamaluddin Daeng Mile	Ksb Tek. Peny.	III/c	296/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
31	06 Apr 2005	Salahudin Pakaya, S.Ag.	Ketua KPU	NA	298/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
32	06 Apr 2005	Ir. Wawan K. Tolinggi	Anggota KPU	NA	298/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
33	06 Apr 2005	Subhan Yunus Ibrahim, S.I.P.	Anggota KPU	NA	298/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
34	06 Apr 2005	Sukri Moonti, S.H., M.H.	Ksb Umum Set. KPU	III/c	298/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
35	06 Apr 2005	Salahudin Pakaya, S.Ag.	Ketua KPU	NA	300/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
36	06 Apr 2005	Ir. Wawan K. Tolinggi	Anggota KPU	NA	300/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
37	06 Apr 2005	Subhan Yunus Ibrahim, S.I.P.	Anggota KPU	NA	300/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
38	06 Apr 2005	Sukri Moonti, S.H., M.H.	Ksb Umum Set. KPU	III/c	300/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
39	06 Apr 2005	Obow Bakar Mohamad Ali, S.E.	Anggota KPU	NA	302/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
40	06 Apr 2005	Ir. Rully Henga	Anggota KPU	NA	302/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
41	06 Apr 2005	Husni A. Deka, S.Sos.	Sekretaris KPU	IV/a	302/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
42	06 Apr 2005	Drs. Djamaluddin Daeng Mile	Ksb Tek. Peny.	III/c	302/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
43	06 Apr 2005	Obow Bakar Mohamad Ali, S.E.	Anggota KPU	NA	304/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
44	06 Apr 2005	Ir. Rully Henga	Anggota KPU	NA	304/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
45	06 Apr 2005	Husni A. Deka, S.Sos.	Sekretaris KPU	IV/a	304/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
46	06 Apr 2005	Drs. Djamaluddin Daeng Mile	Ksb Tek. Peny.	III/c	304/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
47	06 Apr 2005	Salahudin Pakaya, S.Ag.	Ketua KPU	NA	306/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
48	06 Apr 2005	Ir. Wawan K. Tolinggi	Anggota KPU	NA	306/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
49	06 Apr 2005	Subhan Yunus Ibrahim, S.I.P.	Anggota KPU	NA	306/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
50	06 Apr 2005	Sukri Moonti, S.H., M.H.	Ksb Umum Set. KPU	III/c	306/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
51	06 Apr 2005	Salahudin Pakaya, S.Ag.	Ketua KPU	NA	308/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
52	06 Apr 2005	Ir. Wawan K. Tolinggi	Anggota KPU	NA	308/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
53	06 Apr 2005	Subhan Yunus Ibrahim, S.I.P.	Anggota KPU	NA	308/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
54	06 Apr 2005	Sukri Moonti, S.H., M.H.	Ksb Umum Set. KPU	III/c	308/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750
55	06 Apr 2005	Salahudin Pakaya, S.Ag.	Ketua KPU	NA	310/3.6.b/KPU-KAB/IV/2005	Honor	175,000	17,500	26,250	8,750

REKAPITULASI PEMBAYARAN UANG HONOR, LEMBUR, INSENTIF KPUD KAB. GORONTALO BULAN MEI TA 2005

No.	Tanggal Pembayaran	Nama	Jabatan	Gol	Nomor Tanda Terima Pembayaran	Jenis	Uang Honor, Lembur, Insentif	PPH Pasal 21 Dibayarkan	PPH Pasal 21 Seharusnya (15 %)	Jumlah Kurang Dipungut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11 May 2005	Husni A. Deka, S.Sos.	Sekretaris KPU	IV/a	448/KPU-KAB/IV/2005	Honor	500,000	75,000	75,000	-
2	11 May 2005	Sukri Moonti, S.H., M.H.	Ksb Umum Set. KPU	III/c	448/KPU-KAB/IV/2005	Honor	350,000	52,500	52,500	-
3	11 May 2005	Drs. Djamaluddin Daeng Mile	Ksb Tek. Peny.	III/c	448/KPU-KAB/IV/2005	Honor	350,000	52,500	52,500	-
4	11 May 2005	Fatma Tuna, S.Ag.	Ksb Huk. dan Humas	III/b	448/KPU-KAB/IV/2005	Honor	350,000	52,500	52,500	-
5	11 May 2005	Haryanto Imran, S.E.	Bend. Set. KPU	III/a	448/KPU-KAB/IV/2005	Honor	350,000	52,500	52,500	-
6	11 May 2005	Atmin Latif	Bend. Set. KPU	III/a	448/KPU-KAB/IV/2005	Honor	250,000	37,500	37,500	-
7	11 May 2005	Hasni D. Lamanasa, S.T.P.	Staff Set. KPU	III/a	448/KPU-KAB/IV/2005	Honor	200,000	30,000	30,000	-
8	11 May 2005	Nurhayati Buluati, S.Sos.	Staff Set. KPU	III/a	448/KPU-KAB/IV/2005	Honor	200,000	30,000	30,000	-
9	11 May 2005	Subanrio Maliki, A. Ma. Ak.	Staff Set. KPU	II/d	448/KPU-KAB/IV/2005	Honor	200,000	-	-	-
10	11 May 2005	Suherdi Pou	Staff Set. KPU	II/c	448/KPU-KAB/IV/2005	Honor	200,000	-	-	-
11	11 May 2005	Mansur Usman	Staff Set. KPU	II/b	448/KPU-KAB/IV/2005	Honor	200,000	-	-	-
12	11 May 2005	Irmayanti Rifai	Staff Set. KPU	II/b	448/KPU-KAB/IV/2005	Honor	200,000	-	-	-
13	11 May 2005	Farid Wolinga	Staff Set. KPU	II/a	448/KPU-KAB/IV/2005	Honor	200,000	-	-	-
14	11 May 2005	Nurjamal Dasa Prawiranegara	Staff Set. KPU	II/a	448/KPU-KAB/IV/2005	Honor	200,000	-	-	-
15	11 May 2005	Abdurrahman Pakaya, B.B.A.	Honorer	-	448/KPU-KAB/IV/2005	Honor	150,000	-	-	-
16	11 May 2005	Andi Mulyadi Daud	Honorer	-	448/KPU-KAB/IV/2005	Honor	150,000	-	-	-
17	11 May 2005	Rahma Saleh, S.Pd.	Honorer	-	448/KPU-KAB/IV/2005	Honor	150,000	-	-	-
18	11 May 2005	Friyanto Hatibie	Honorer	-	448/KPU-KAB/IV/2005	Honor	150,000	-	-	-
19	11 May 2005	Andi Ulfa Abd. Aziz, A.Md.	Honorer	-	448/KPU-KAB/IV/2005	Honor	150,000	-	-	-
20	11 May 2005	Husni A. Deka, S.Sos.	Sekretaris KPU	IV/a	450/KPU-KAB/V/2005	Honor	500,000	75,000	75,000	-
21	11 May 2005	Sukri Moonti, S.H., M.H.	Ksb Umum Set. KPU	III/c	450/KPU-KAB/V/2005	Honor	350,000	52,500	52,500	-
22	11 May 2005	Drs. Djamaluddin Daeng Mile	Ksb Tek. Peny.	III/c	450/KPU-KAB/V/2005	Honor	350,000	52,500	52,500	-
23	11 May 2005	Fatma Tuna, S.Ag.	Ksb Huk. dan Humas	III/b	450/KPU-KAB/V/2005	Honor	350,000	52,500	52,500	-

24	11 May 2005	Haryanto Imran, S.E.	Bend. Set. KPU	III/a	450/KPU-KAB/VI/2005	Honor	350,000	52,500	52,500	-
25	11 May 2005	Atmin Latif	Bend. Set. KPU	III/a	450/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	37,500	37,500	-
26	11 May 2005	Hasni D. Lamanasa, S.T.P.	Staff Set. KPU	III/a	450/KPU-KAB/VI/2005	Honor	200,000	30,000	30,000	-
27	11 May 2005	Nurhayati Buluati, S.Sos.	Staff Set. KPU	III/a	450/KPU-KAB/VI/2005	Honor	200,000	30,000	30,000	-
28	11 May 2005	Subanrio Maliki, A. Ma. Ak.	Staff Set. KPU	II/d	450/KPU-KAB/VI/2005	Honor	200,000	-	-	-
29	11 May 2005	Suherdi Pou	Staff Set. KPU	II/c	450/KPU-KAB/VI/2005	Honor	200,000	-	-	-
30	11 May 2005	Mansur Usman	Staff Set. KPU	II/b	450/KPU-KAB/VI/2005	Honor	200,000	-	-	-
31	11 May 2005	Irmayanti Rifai	Staff Set. KPU	II/b	450/KPU-KAB/VI/2005	Honor	200,000	-	-	-
32	11 May 2005	Farid Wolinga	Staff Set. KPU	II/a	450/KPU-KAB/VI/2005	Honor	200,000	-	-	-
33	11 May 2005	Nurjamal Dasa Prawiranegara	Staff Set. KPU	II/a	450/KPU-KAB/VI/2005	Honor	200,000	-	-	-
34	11 May 2005	Abdurrahman Pakaya, B.B.A.	Honoror	-	450/KPU-KAB/VI/2005	Honor	150,000	-	-	-
35	11 May 2005	Andi Mulyadi Daud	Honoror	-	450/KPU-KAB/VI/2005	Honor	150,000	-	-	-
36	11 May 2005	Rahma Saleh, S.Pd.	Honoror	-	450/KPU-KAB/VI/2005	Honor	150,000	-	-	-
37	11 May 2005	Friyanto Hatibie	Honoror	-	450/KPU-KAB/VI/2005	Honor	150,000	-	-	-
38	11 May 2005	Andi Ulfa Abd. Aziz, A.Md.	Honoror	-	450/KPU-KAB/VI/2005	Honor	150,000	-	-	-
39	13 May 2005	Husni A. Deka, S.Sos.	Sekretaris KPU	IV/a	488/11.2/KPU-KAB/IV/2005	Lembur	150,000	22,500	22,500	-
40	13 May 2005	Sukri Moonti, S.H., M.H.	Ksb Umum Set. KPU	III/c	488/11.2/KPU-KAB/IV/2005	Lembur	150,000	22,500	22,500	-
41	13 May 2005	Drs. Djamaluddin Daeng Mile	Ksb Tek. Peny.	III/c	488/11.2/KPU-KAB/IV/2005	Lembur	150,000	22,500	22,500	-
42	13 May 2005	Fatma Tuna, S.Ag.	Ksb Huk. dan Humas	III/b	488/11.2/KPU-KAB/IV/2005	Lembur	150,000	22,500	22,500	-
43	13 May 2005	Haryanto Imran, S.E.	Bend. Set. KPU	III/a	488/11.2/KPU-KAB/IV/2005	Lembur	150,000	22,500	22,500	-
44	13 May 2005	Atmin Latif	Bend. Set. KPU	III/a	488/11.2/KPU-KAB/IV/2005	Lembur	150,000	22,500	22,500	-
45	13 May 2005	Maylan Tongkodu, S.Kom.	Staff Set. KPU	III/a	488/11.2/KPU-KAB/IV/2005	Lembur	150,000	22,500	22,500	-
46	13 May 2005	Nurhayati Buluati, S.Sos.	Staff Set. KPU	III/a	488/11.2/KPU-KAB/IV/2005	Lembur	150,000	22,500	22,500	-
47	13 May 2005	Subanrio Maliki, A. Ma. Ak.	Staff Set. KPU	II/d	488/11.2/KPU-KAB/IV/2005	Lembur	150,000	-	-	-
48	13 May 2005	Suherdi Pou	Staff Set. KPU	II/c	488/11.2/KPU-KAB/IV/2005	Lembur	150,000	-	-	-
49	13 May 2005	Mansur Usman	Staff Set. KPU	II/b	488/11.2/KPU-KAB/IV/2005	Lembur	150,000	-	-	-
50	13 May 2005	Irmayanti Rifai	Staff Set. KPU	II/b	488/11.2/KPU-KAB/IV/2005	Lembur	150,000	-	-	-
51	13 May 2005	Farid Wolinga	Staff Set. KPU	II/a	488/11.2/KPU-KAB/IV/2005	Lembur	150,000	-	-	-
52	13 May 2005	Nurjamal Dasa Prawiranegara	Staff Set. KPU	II/a	488/11.2/KPU-KAB/IV/2005	Lembur	150,000	-	-	-
53	13 May 2005	Abdurrahman Pakaya, B.B.A.	Honoror	-	488/11.2/KPU-KAB/IV/2005	Lembur	150,000	-	-	-
54	13 May 2005	Andi Mulyadi Daud	Honoror	-	488/11.2/KPU-KAB/IV/2005	Lembur	150,000	-	-	-

55	13 May 2005	Rahma Saleh, S.Pd.	Honoror	-	488/11.2/KPU-KAB/IV/2005	Lembur	150,000	-	-	-
56	13 May 2005	Friyanto Hatibie	Honoror	-	488/11.2/KPU-KAB/IV/2005	Lembur	150,000	-	-	-
57	13 May 2005	Andi Ulfa Abd. Aziz, A.Md.	Honoror	-	488/11.2/KPU-KAB/IV/2005	Lembur	150,000	-	-	-
58	01 May 2005	Ir. Rully Henga	Anggota KPU	NA	501/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	37,500	37,500	-
59	01 May 2005	Husni A. Deka, S.Sos.	Sekretaris KPU	IV/a	501/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	37,500	37,500	-
60	01 May 2005	Suherdi Pou	Staff Set. KPU	III/c	501/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	-	-	-
61	01 May 2005	Farid Wolinga	Staff Set. KPU	III/a	501/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	-	-	-
62	01 May 2005	Sucipto Abdullah	#N/A	#N/A	501/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	-	-	-
63	01 May 2005	Hamdan Zain S.Fil.I.	#N/A	#N/A	501/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	-	-	-
64	01 May 2005	Abdurrahman Pakaya, B.B.A.	Honoror	-	501/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	-	-	-
65	01 May 2005	Husna Tilahunga	#N/A	#N/A	501/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	-	-	-
66	01 May 2005	Chandra Henga	#N/A	#N/A	501/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	-	-	-
67	01 May 2005	Rahma Saleh, S.Pd.	Honoror	-	501/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	-	-	-
68	20 May 2005	Salahudin Pakaya, S.Ag.	Ketua KPU	NA	503/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	37,500	37,500	-
69	20 May 2005	Obow Bakar Mohamad Ali, S.E.	Anggota KPU	NA	503/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	37,500	37,500	-
70	20 May 2005	Ir. Rully Henga	Anggota KPU	NA	503/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	37,500	37,500	-
71	20 May 2005	Ir. Wawan K. Tolinggi	Anggota KPU	NA	503/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	37,500	37,500	-
72	20 May 2005	Subhan Yunus Ibrahim, S.I.P.	Anggota KPU	NA	503/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	37,500	37,500	-
73	20 May 2005	Husni A. Deka, S.Sos.	Sekretaris KPU	IV/a	503/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	37,500	37,500	-
74	20 May 2005	Sukri Moonti, S.H., M.H.	Ksb Umum Set. KPU	III/c	503/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	37,500	37,500	-
75	20 May 2005	Drs. Djamaluddin Daeng Mile	Ksb Tek. Peny.	III/c	503/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	37,500	37,500	-
76	20 May 2005	Suherdi Pou	Staff Set. KPU	III/c	503/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	-	-	-
77	20 May 2005	Husna Tilahunga	#N/A	#N/A	503/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	-	-	-
78	01 May 2005	Husni A. Deka, S.Sos.	Sekretaris KPU	IV/a	604/11.2/KPU-KAB/VI/2005	Lembur	150,000	22,500	22,500	-
79	01 May 2005	Sukri Moonti, S.H., M.H.	Ksb Umum Set. KPU	III/c	604/11.2/KPU-KAB/VI/2005	Lembur	150,000	22,500	22,500	-
80	01 May 2005	Drs. Djamaluddin Daeng Mile	Ksb Tek. Peny.	III/c	604/11.2/KPU-KAB/VI/2005	Lembur	150,000	22,500	22,500	-
81	01 May 2005	Fatma Tuna, S.Ag.	Ksb Huk. dan Humas	III/b	604/11.2/KPU-KAB/VI/2005	Lembur	150,000	22,500	22,500	-
82	01 May 2005	Haryanto Imran, S.E.	Bend. Set. KPU	III/a	604/11.2/KPU-KAB/VI/2005	Lembur	150,000	22,500	22,500	-
83	01 May 2005	Atmin Latif	Bend. Set. KPU	III/a	604/11.2/KPU-KAB/VI/2005	Lembur	150,000	22,500	22,500	-
84	01 May 2005	Maylan Tongkodu, S.Kom.	Staff Set. KPU	III/a	604/11.2/KPU-KAB/VI/2005	Lembur	150,000	22,500	22,500	-
85	01 May 2005	Nurhayati Buluati, S.Sos.	Staff Set. KPU	III/a	604/11.2/KPU-KAB/VI/2005	Lembur	150,000	22,500	22,500	-

86	01 May 2005	Subanrio Maliki, A. Ma. Ak.	Staff Set. KPU	II/d	604/11.2/KPU-KAB/V/2005	Lembur	150,000	-	-	-
87	01 May 2005	Suherdi Pou	Staff Set. KPU	II/c	604/11.2/KPU-KAB/V/2005	Lembur	150,000	-	-	-
88	01 May 2005	Mansur Usman	Staff Set. KPU	II/b	604/11.2/KPU-KAB/V/2005	Lembur	150,000	-	-	-
89	01 May 2005	Irmayanti Rifai	Staff Set. KPU	II/b	604/11.2/KPU-KAB/V/2005	Lembur	150,000	-	-	-
90	01 May 2005	Farid Wolinga	Staff Set. KPU	II/a	604/11.2/KPU-KAB/V/2005	Lembur	150,000	-	-	-
91	01 May 2005	Nurjamal Dasa Prawiranegara	Staff Set. KPU	II/a	604/11.2/KPU-KAB/V/2005	Lembur	150,000	-	-	-
									-	-
									-	-
		JUMLAH					18,950,000	1,500,000		-

REKAPITULASI PEMBAYARAN UANG HONOR, LEMBUR, INSENTIF KPUD KAB. GORONTALO BULAN JUNI TA 2005

No.	Tanggal Pembayaran	Nama	Jabatan	Gol	Nomor Tanda Terima Pembayaran	Jenis	Uang Honor, Lembur, Insentif	PPH Pasal 21 Dibayarkan	PPH Pasal 21 Seharusnya (15 %)	Jumlah Kurang Dipungut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01 Jun 2005	Husni A. Deka, S.Sos.	Sekretaris KPU	IV/a	615/KPU-KAB/VI/2005	Honor	500,000	75,000	75,000	-
2	01 Jun 2005	Sukri Moonti, S.H., M.H.	Ksb Umum Set. KPU	III/c	615/KPU-KAB/VI/2005	Honor	350,000	52,500	52,500	-
3	01 Jun 2005	Drs. Djamaluddin Daeng Mile	Ksb Tek. Peny.	III/c	615/KPU-KAB/VI/2005	Honor	350,000	52,500	52,500	-
4	01 Jun 2005	Fatma Tuna, S.Ag.	Ksb Huk. dan Humas	III/b	615/KPU-KAB/VI/2005	Honor	350,000	52,500	52,500	-
5	01 Jun 2005	Haryanto Imran, S.E.	Bend. Set. KPU	III/a	615/KPU-KAB/VI/2005	Honor	350,000	52,500	52,500	-
6	01 Jun 2005	Atmin Latif	Bend. Set. KPU	III/a	615/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	37,500	37,500	-
7	01 Jun 2005	Maylan Tongkodu, S.Kom.	Staff Set. KPU	III/a	615/KPU-KAB/VI/2005	Honor	200,000	30,000	30,000	-
8	01 Jun 2005	Subanrio Maliki, A. Ma. Ak.	Staff Set. KPU	II/d	615/KPU-KAB/VI/2005	Honor	200,000	-	-	-
9	01 Jun 2005	Olan Ishak Yantiko	Staff Set. KPU	II/c	615/KPU-KAB/VI/2005	Honor	200,000	-	-	-
10	01 Jun 2005	Suherdi Pou	Staff Set. KPU	II/c	615/KPU-KAB/VI/2005	Honor	200,000	-	-	-
11	01 Jun 2005	Mansur Usman	Staff Set. KPU	II/b	615/KPU-KAB/VI/2005	Honor	200,000	-	-	-
12	01 Jun 2005	Wahab Kau	Staff Set. KPU	II/a	615/KPU-KAB/VI/2005	Honor	200,000	-	-	-
13	01 Jun 2005	Farid Wolinga	Staff Set. KPU	II/a	615/KPU-KAB/VI/2005	Honor	200,000	-	-	-
14	01 Jun 2005	Nurjamal Dasa Prawiranegara	Staff Set. KPU	II/a	615/KPU-KAB/VI/2005	Honor	200,000	-	-	-
15	01 Jun 2005	Abdurrahman Pakaya, B.B.A.	Honoror	-	615/KPU-KAB/VI/2005	Honor	150,000	-	-	-
16	01 Jun 2005	Andi Mulyadi Daud	Honoror	-	615/KPU-KAB/VI/2005	Honor	150,000	-	-	-
17	01 Jun 2005	Rahma Saleh, S.Pd.	Honoror	-	615/KPU-KAB/VI/2005	Honor	150,000	-	-	-
18	01 Jun 2005	Friyanto Hatibie	Honoror	-	615/KPU-KAB/VI/2005	Honor	150,000	-	-	-
19	01 Jun 2005	Andi Ulfa Abd. Aziz, A.Md.	Honoror	-	615/KPU-KAB/VI/2005	Honor	150,000	-	-	-
20	14 Jun 2005	Ir. Wawan K. Tolinggi	Anggota KPU	NA	701/3.9.a/KPU-KAB/VI/2005	Honor	1,500,000	225,000	225,000	-
21	14 Jun 2005	Subhan Yunus Ibrahim, S.I.P.	Anggota KPU	NA	701/3.9.a/KPU-KAB/VI/2005	Honor	1,350,000	202,500	202,500	-
22	14 Jun 2005	Salahudin Pakaya, S.Ag.	Ketua KPU	NA	701/3.9.a/KPU-	Honor	1,176,500	176,475	176,475	-

					KAB/VI/2005					
23	14 Jun 2005	Ir. Rully Henga	Anggota KPU	NA	701/3.9.a/KPU-KAB/VI/2005	Honor	1,176,500	176,475	176,475	-
24	14 Jun 2005	Obow Bakar Mohamad Ali, S.E.	Anggota KPU	NA	701/3.9.a/KPU-KAB/VI/2005	Honor	1,176,500	176,475	176,475	-
25	14 Jun 2005	Husni A. Deka, S.Sos.	Sekretaris KPU	IV/a	701/3.9.a/KPU-KAB/VI/2005	Honor	1,176,500	176,475	176,475	-
26	14 Jun 2005	Sukri Moonti, S.H., M.H.	Ksb Umum Set. KPU	III/c	701/3.9.a/KPU-KAB/VI/2005	Honor	1,176,500	176,475	176,475	-
27	14 Jun 2005	Drs. Djamaluddin Daeng Mile	Ksb Tek. Peny.	III/c	701/3.9.a/KPU-KAB/VI/2005	Honor	1,176,500	176,475	176,475	-
28	16 Jun 2005	Dr. Abd. Gafaar L., M.Si.	#N/A	#N/A	724/3.9.d/KPU-KAB/VI/2005	Honor	882,500	132,375	132,375	-
29	16 Jun 2005	Drs. Sastro Wantu, M.Si.	#N/A	#N/A	724/3.9.d/KPU-KAB/VI/2005	Honor	882,500	132,375	132,375	-
30	16 Jun 2005	Ir. Alim Niode, M.Si.	#N/A	#N/A	724/3.9.d/KPU-KAB/VI/2005	Honor	882,500	132,375	132,375	-
31	16 Jun 2005	Kasman Mohammad	#N/A	#N/A	724/3.9.d/KPU-KAB/VI/2005	Honor	882,500	132,375	132,375	-
32	17 Jun 2005	Drs. Djamaluddin Daeng Mile	Ksb Tek. Peny.	III/c	819/3.9.d/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	37,500	37,500	-
33	17 Jun 2005	Yusuf Tomayahu, S.H.	Staff Set. KPU	III/a	819/3.9.d/KPU-KAB/VI/2005	Honor	200,000	30,000	30,000	-
34	17 Jun 2005	Nurjamal Dasa Prawiranegara	Staff Set. KPU	II/a	819/3.9.d/KPU-KAB/VI/2005	Honor	150,000	-	-	-
35	17 Jun 2005	Andi Mulyadi Daud	Honor	-	819/3.9.d/KPU-KAB/VI/2005	Honor	100,000	-	-	-
36	17 Jun 2005	Hamdan Zain S.Fil.I.	#N/A	#N/A	819/3.9.d/KPU-KAB/VI/2005	Honor	100,000	-	-	-
37	17 Jun 2005	Friyanto Hatibie	Honor	-	819/3.9.d/KPU-KAB/VI/2005	Honor	150,000	-	-	-
38	17 Jun 2005	Andi Ulfa Abd. Aziz, A.Md.	Honor	-	819/3.9.d/KPU-KAB/VI/2005	Honor	100,000	-	-	-
39	17 Jun 2005	Rahma Saleh, S.Pd.	Honor	-	819/3.9.d/KPU-KAB/VI/2005	Honor	100,000	-	-	-
40	17 Jun 2005	Atmin Latif	Bend. Set. KPU	III/a	819/3.9.d/KPU-KAB/VI/2005	Honor	100,000	15,000	15,000	-
41	20 Jun 2005	Salahudin Pakaya, S.Ag.	Ketua KPU	NA	836/3.6/KPU-KAB/VI/2005	Honor	100,000	15,000	15,000	-
42	20 Jun 2005	Ir. Rully Henga	Anggota KPU	NA	836/3.6/KPU-KAB/VI/2005	Honor	100,000	15,000	15,000	-
43	20 Jun 2005	Husni A. Deka, S.Sos.	Sekretaris KPU	IV/a	836/3.6/KPU-KAB/VI/2005	Honor	100,000	15,000	15,000	-

44	20 Jun 2005	Drs. Djamaluddin Daeng Mile	Ksb Tek. Peny.	III/c	836/3.6/KPU-KAB/VI/2005	Honor	100,000	15,000	15,000	-
45	20 Jun 2005	Husni A. Deka, S.Sos.	Sekretaris KPU	IV/a	838/3.6.d/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	37,500	37,500	-
46	20 Jun 2005	Drs. Djamaluddin Daeng Mile	Ksb Tek. Peny.	III/c	838/3.6.d/KPU-KAB/VI/2005	Honor	200,000	30,000	30,000	-
47	20 Jun 2005	Haryanto Imran, S.E.	Bend. Set. KPU	III/a	838/3.6.d/KPU-KAB/VI/2005	Honor	100,000	15,000	15,000	-
48	20 Jun 2005	Atmin Latif	Bend. Set. KPU	III/a	838/3.6.d/KPU-KAB/VI/2005	Honor	100,000	15,000	15,000	-
49	20 Jun 2005	Farid Wolinga	Staff Set. KPU	II/a	838/3.6.d/KPU-KAB/VI/2005	Honor	100,000	-	-	-
50	20 Jun 2005	Serli Deoli	#N/A	#N/A	838/3.6.d/KPU-KAB/VI/2005	Honor	100,000	-	-	-
51	20 Jun 2005	Suherdi Pou	Staff Set. KPU	II/c	838/3.6.d/KPU-KAB/VI/2005	Honor	100,000	-	-	-
52	20 Jun 2005	Abdurrahman Pakaya, B.B.A.	Honoror	-	838/3.6.d/KPU-KAB/VI/2005	Honor	100,000	-	-	-
53	20 Jun 2005	Rahma Saleh, S.Pd.	Honoror	-	838/3.6.d/KPU-KAB/VI/2005	Honor	100,000	-	-	-
54	28 Jun 2005	Sukri Moonti, S.H., M.H.	Ksb Umum Set. KPU	III/c	880/2.1/KPU-KAB/VI/2005	Honor	1,200,000	180,000	180,000	-
55	28 Jun 2005	Yusuf Tomayahu, S.H.	Staff Set. KPU	III/a	880/2.1/KPU-KAB/VI/2005	Honor	1,200,000	180,000	180,000	-
56	28 Jun 2005	Drs. Djamaluddin Daeng Mile	Ksb Tek. Peny.	III/c	880/2.1/KPU-KAB/VI/2005	Honor	1,200,000	180,000	180,000	-
57	28 Jun 2005	Wahab Kau	Staff Set. KPU	II/a	880/2.1/KPU-KAB/VI/2005	Honor	800,000	-	-	-
58	28 Jun 2005	Farid Wolinga	Staff Set. KPU	II/a	880/2.1/KPU-KAB/VI/2005	Honor	800,000	-	-	-
59	29 Jun 2005	Ir. Rully Henga	Anggota KPU	NA	885/1.1.h/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	37,500	37,500	-
60	29 Jun 2005	Risman K. Umar, S.Sos.	Staff Set. KPU	III/a	885/1.1.h/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	37,500	37,500	-
61	29 Jun 2005	Suherdi Pou	Staff Set. KPU	II/c	885/1.1.h/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	-	-	-
62	29 Jun 2005	Mansur Usman	Staff Set. KPU	II/b	885/1.1.h/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	-	-	-
63	29 Jun 2005	Haryanto Imran, S.E.	Bend. Set. KPU	III/a	885/1.1.h/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	37,500	37,500	-
64	29 Jun 2005	Subanrio Maliki, A. Ma. Ak.	Staff Set. KPU	II/d	885/1.1.h/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	-	-	-
65	29 Jun 2005	Husna Tilahunga	#N/A	#N/A	885/1.1.h/KPU-	Honor	250,000	-	-	-

					KAB/VI/2005					
66	29 Jun 2005	Serli Deoli	#N/A	#N/A	885/1.1.h/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	-	-	-
67	29 Jun 2005	Hamdan Zain S.Fil.I.	#N/A	#N/A	885/1.1.h/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	37,500	37,500	-
68	29 Jun 2005	Yusuf Tomayahu, S.H.	Staff Set. KPU	III/a	885/1.1.h/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	37,500	37,500	-
69	29 Jun 2005	Olan Ishak Yantiko	Staff Set. KPU	II/c	885/1.1.h/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	-	-	-
70	29 Jun 2005	Maylan Tongkodu, S.Kom.	Staff Set. KPU	III/a	885/1.1.h/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	37,500	37,500	-
71	29 Jun 2005	Farid Wolinga	Staff Set. KPU	II/a	885/1.1.h/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	-	-	-
72	29 Jun 2005	Atmin Latif	Bend. Set. KPU	III/a	885/1.1.h/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	37,500	37,500	-
73	29 Jun 2005	Nurhayati Buluati, S.Sos.	Staff Set. KPU	III/a	885/1.1.h/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	37,500	37,500	-
74	29 Jun 2005	Abdurrahman Pakaya, B.B.A.	Honoror	-	885/1.1.h/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	-	-	-
75	29 Jun 2005	Sucipto Abdullah	#N/A	#N/A	885/1.1.h/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	-	-	-
76	29 Jun 2005	Yahya Lamatenggo	Ksb Program	III/c	885/1.1.h/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	37,500	37,500	-
77	29 Jun 2005	Andi Ulfa Abd. Aziz, A.Md.	Honoror	-	885/1.1.h/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	-	-	-
78	29 Jun 2005	Andi Mulyadi Daud	Honoror	-	885/1.1.h/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	-	-	-
79	29 Jun 2005	Nurjamal Dasa Prawiranegara	Staff Set. KPU	II/a	885/1.1.h/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	-	-	-
80	29 Jun 2005	Chandra Henga	#N/A	#N/A	885/1.1.h/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	-	-	-
81	29 Jun 2005	Friyanto Hatibie	Honoror	-	885/1.1.h/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	-	-	-
82	29 Jun 2005	Rahma Saleh, S.Pd.	Honoror	-	885/1.1.h/KPU-KAB/VI/2005	Honor	250,000	-	-	-
83	30 Jun 2005	Husni A. Deka, S.Sos.	Sekretaris KPU	IV/a	903/11.2/KPU-KAB/VI/2005	Lembur	150,000	22,500	22,500	-
84	30 Jun 2005	Sukri Moonti, S.H., M.H.	Ksb Umum Set. KPU	III/c	903/11.2/KPU-KAB/VI/2005	Lembur	150,000	22,500	22,500	-
85	30 Jun 2005	Drs. Djamaluddin Daeng Mile	Ksb Tek. Peny.	III/c	903/11.2/KPU-KAB/VI/2005	Lembur	150,000	22,500	22,500	-
86	30 Jun 2005	Fatma Tuna, S.Ag.	Ksb Huk. dan Humas	III/b	903/11.2/KPU-KAB/VI/2005	Lembur	150,000	22,500	22,500	-

REKAPITULASI PEMBAYARAN UANG HONOR, LEMBUR, INSENTIF KPUD KAB. GORONTALO BULAN JULI TA 2005

No.	Tanggal Pembayaran	Nama	Jabatan	Gol	Dokumen	Jenis	Uang Honor, Lembur, Insentif	PPH Pasal 21 Dibayarkan	PPH Pasal 21 Seharusnya (15 %)	Jumlah Kurang Dipungut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01 Jul 2005	Salahudin Pakaya, S.Ag.	Ketua KPU	NA	1.1.a/KPU-KAB/VII/2005	Honor	1,500,000	150,000	225,000	75,000
2	01 Jul 2005	Ir. Rully Henga	Anggota KPU	NA	1.1.a/KPU-KAB/VII/2005	Honor	1,250,000	125,000	187,500	62,500
3	01 Jul 2005	Obow Bakar Mohamad Ali, S.E.	Anggota KPU	NA	1.1.a/KPU-KAB/VII/2005	Honor	1,250,000	125,000	187,500	62,500
4	01 Jul 2005	Ir. Wawan K. Tolinggi	Anggota KPU	NA	1.1.a/KPU-KAB/VII/2005	Honor	1,250,000	125,000	187,500	62,500
5	01 Jul 2005	Subhan Yunus Ibrahim, S.I.P.	Anggota KPU	NA	1.1.a/KPU-KAB/VII/2005	Honor	1,250,000	125,000	187,500	62,500
6	01 Jul 2005	Husni A. Deka, S.Sos.	Sekretaris KPU	IV/a	1.1.b/KPU-KAB/VII/2005	Honor	500,000	75,000	75,000	-
7	01 Jul 2005	Sukri Moonti, S.H., M.H.	Ksb Umum Set. KPU	III/c	1.1.b/KPU-KAB/VII/2005	Honor	350,000	52,500	52,500	-
8	01 Jul 2005	Drs. Djamaluddin Daeng Mile	Ksb Tek. Peny.	III/c	1.1.b/KPU-KAB/VII/2005	Honor	350,000	52,500	52,500	-
9	01 Jul 2005	Fatma Tuna, S.Ag.	Ksb Huk. dan Humas	III/b	1.1.b/KPU-KAB/VII/2005	Honor	350,000	52,500	52,500	-
10	01 Jul 2005	Haryanto Imran, S.E.	Bend. Set. KPU	III/a	1.1.b/KPU-KAB/VII/2005	Honor	350,000	52,500	52,500	-
11	01 Jul 2005	Atmin Latif	Bend. Set. KPU	III/a	1.1.b/KPU-KAB/VII/2005	Honor	250,000	37,500	37,500	-
12	01 Jul 2005	Maylan Tongkodu, S.Kom.	Staff Set. KPU	III/a	1.1.b/KPU-KAB/VII/2005	Honor	200,000	30,000	30,000	-
13	01 Jul 2005	Subanrio Maliki, A. Ma. Ak.	Staff Set. KPU	II/d	1.1.b/KPU-KAB/VII/2005	Honor	200,000	-	-	-
14	01 Jul 2005	Olan Ishak Yantiko	Staff Set. KPU	II/c	1.1.b/KPU-KAB/VII/2005	Honor	200,000	-	-	-
15	01 Jul 2005	Suherdi Pou	Staff Set. KPU	II/c	1.1.b/KPU-KAB/VII/2005	Honor	200,000	-	-	-
16	01 Jul 2005	Mansur Usman	Staff Set. KPU	II/b	1.1.b/KPU-KAB/VII/2005	Honor	200,000	-	-	-
17	01 Jul 2005	Wahab Kau	Staff Set. KPU	II/a	1.1.b/KPU-KAB/VII/2005	Honor	200,000	-	-	-
18	01 Jul 2005	Farid Wolinga	Staff Set. KPU	II/a	1.1.b/KPU-KAB/VII/2005	Honor	200,000	-	-	-
19	01 Jul 2005	Nurjamal Dasa Prawiranegara	Staff Set. KPU	II/a	1.1.b/KPU-KAB/VII/2005	Honor	200,000	-	-	-
20	01 Jul 2005	Abdurrahman Pakaya, B.B.A.	Honorar	-	1.1.b/KPU-KAB/VII/2005	Honor	150,000	-	-	-
21	01 Jul 2005	Andi Mulyadi Daud	Honorar	-	1.1.b/KPU-KAB/VII/2005	Honor	150,000	-	-	-
22	01 Jul 2005	Rahma Saleh, S.Pd.	Honorar	-	1.1.b/KPU-KAB/VII/2005	Honor	150,000	-	-	-

23	01 Jul 2005	Friyanto Hatibie	Honorer	-	1.1.b/KPU-KAB/VII/2005	Honor	150,000	-	-	-
24	01 Jul 2005	Andi Ulfa Abd. Aziz, A.Md.	Honorer	-	1.1.b/KPU-KAB/VII/2005	Honor	150,000	-	-	-
25	04 Jul 2005	Ir. Rully Henga	Anggota KPU	NA	1/1.2/KPU-KAB/VII/2005	Honor	250,000	37,500	37,500	-
26	04 Jul 2005	Yahya Lamatenggo	Ksb Program	III/c	1/1.2/KPU-KAB/VII/2005	Honor	250,000	37,500	37,500	-
27	04 Jul 2005	Farid Wolinga	Staff Set. KPU	II/a	1/1.2/KPU-KAB/VII/2005	Honor	250,000	-	-	-
28	04 Jul 2005	Nurjamal Dasa Prawiranegara	Staff Set. KPU	II/a	1/1.2/KPU-KAB/VII/2005	Honor	250,000	-	-	-
29	04 Jul 2005	Hamdan Zain S.Fil.I.	#N/A	#N/A	1/1.2/KPU-KAB/VII/2005	Honor	250,000	-	-	-
30	04 Jul 2005	Andi Mulyadi Daud	Honorer	-	1/1.2/KPU-KAB/VII/2005	Honor	250,000	-	-	-
31	04 Jul 2005	Abdurrahman Pakaya, B.B.A.	Honorer	-	1/1.2/KPU-KAB/VII/2005	Honor	250,000	-	-	-
32	08 Jul 2005	Obow Bakar Mohamad Ali, S.E.	Anggota KPU	NA	2/1.2/KPU-KAB/VII/2005	Honor	250,000	37,500	37,500	-
33	08 Jul 2005	Drs. Djamaluddin Daeng Mile	Ksb Tek. Peny.	III/c	2/1.2/KPU-KAB/VII/2005	Honor	250,000	37,500	37,500	-
34	08 Jul 2005	Yusuf Tomayahu, S.H.	Staff Set. KPU	III/a	2/1.2/KPU-KAB/VII/2005	Honor	250,000	37,500	37,500	-
35	08 Jul 2005	Risman K. Umar, S.Sos.	Staff Set. KPU	III/a	2/1.2/KPU-KAB/VII/2005	Honor	250,000	37,500	37,500	-
36	08 Jul 2005	Suherdi Pou	Staff Set. KPU	II/c	2/1.2/KPU-KAB/VII/2005	Honor	250,000	-	-	-
37	08 Jul 2005	Husna Tilahunga	#N/A	#N/A	2/1.2/KPU-KAB/VII/2005	Honor	250,000	-	-	-
38	08 Jul 2005	Chandra Henga	#N/A	#N/A	2/1.2/KPU-KAB/VII/2005	Honor	250,000	-	-	-
39	08 Jul 2005	Friyanto Hatibie	Honorer	-	2/1.2/KPU-KAB/VII/2005	Honor	250,000	-	-	-
40	30 Jul 2005	Husni A. Deka, S.Sos.	Sekretaris KPU	IV/a	1/11.2/KPU-KAB/VIII/2005	Lembur	150,000	22,500	22,500	-
41	30 Jul 2005	Sukri Moonti, S.H., M.H.	Ksb Umum Set. KPU	III/c	1/11.2/KPU-KAB/VIII/2005	Lembur	150,000	22,500	22,500	-
42	30 Jul 2005	Yahya Lamatenggo	Ksb Program	III/c	1/11.2/KPU-KAB/VIII/2005	Lembur	150,000	22,500	22,500	-
43	30 Jul 2005	Fatma Tuna, S.Ag.	Ksb Huk. dan Humas	III/b	1/11.2/KPU-KAB/VIII/2005	Lembur	150,000	22,500	22,500	-
44	30 Jul 2005	Haryanto Imran, S.E.	Bend. Set. KPU	III/a	1/11.2/KPU-KAB/VIII/2005	Lembur	150,000	22,500	22,500	-
45	30 Jul 2005	Atmin Latif	Bend. Set. KPU	III/a	1/11.2/KPU-KAB/VIII/2005	Lembur	150,000	22,500	22,500	-
46	30 Jul 2005	Maylan Tongkodu, S.Kom.	Staff Set. KPU	III/a	1/11.2/KPU-KAB/VIII/2005	Lembur	150,000	22,500	22,500	-
47	30 Jul 2005	Yusuf Tomayahu, S.H.	Staff Set. KPU	III/a	1/11.2/KPU-KAB/VIII/2005	Lembur	150,000	22,500	22,500	-
48	30 Jul 2005	Nurhayati Buluati, S.Sos.	Staff Set. KPU	III/a	1/11.2/KPU-KAB/VIII/2005	Lembur	150,000	22,500	22,500	-
49	30 Jul 2005	Risman K. Umar, S.Sos.	Staff Set. KPU	III/a	1/11.2/KPU-KAB/VIII/2005	Lembur	150,000	22,500	22,500	-
50	30 Jul 2005	Subanrio Maliki, A. Ma. Ak.	Staff Set. KPU	II/d	1/11.2/KPU-KAB/VIII/2005	Lembur	150,000	-	-	-
51	30 Jul 2005	Suherdi Pou	Staff Set. KPU	II/c	1/11.2/KPU-KAB/VIII/2005	Lembur	150,000	-	-	-
52	30 Jul 2005	Mansur Usman	Staff Set. KPU	II/b	1/11.2/KPU-KAB/VIII/2005	Lembur	150,000	-	-	-
53	30 Jul 2005	Farid Wolinga	Staff Set. KPU	II/a	1/11.2/KPU-KAB/VIII/2005	Lembur	150,000	-	-	-

54	30 Jul 2005	Nurjamal Dasa Prawiranegara	Staff Set. KPU	II/a	/11.2/KPU-KAB/VIII/2005	Lembur	150,000	-	-	-
55	30 Jul 2005	Wahab Kau	Staff Set. KPU	II/a	/11.2/KPU-KAB/VIII/2005	Lembur	150,000	-	-	-
56	30 Jul 2005	Olan Ishak Yantiko	Staff Set. KPU	II/c	/11.2/KPU-KAB/VIII/2005	Lembur	150,000	-	-	-
57	30 Jul 2005	Serly Deoli	#N/A	#N/A	/11.2/KPU-KAB/VIII/2005	Lembur	150,000	-	-	-
58	30 Jul 2005	Husna Tilahunga	#N/A	#N/A	/11.2/KPU-KAB/VIII/2005	Lembur	150,000	-	-	-
		JUMLAH					17,600,000	1,452,500		325,000

**REKAPITULASI PEMBAYARAN UANG HONOR, LEMBUR, INSENTIF KPUD KAB. GORONTALO BULAN AGUSTUS
TA 2005**

No.	Tanggal Pembayaran	Nama	Jabatan	Gol	Dokumen	Jenis	Uang Honor, Lembur, Insentif	PPH Pasal 21 Dibayarkan	PPH Pasal 21 Seharusnya (15 %)	Jumlah Kurang Dipungut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	01 Aug 2005	Salahudin Pakaya, S.Ag.	Ketua KPU	NA	1/KPU-KAB/VIII/2005	Honor	1,500,000	150,000	225,000	75,000
2	01 Aug 2005	Ir. Rully Henga	Anggota KPU	NA	1/KPU-KAB/VIII/2005	Honor	1,250,000	125,000	187,500	62,500
3	01 Aug 2005	Obow Bakar Mohamad Ali, S.E.	Anggota KPU	NA	1/KPU-KAB/VIII/2005	Honor	1,250,000	125,000	187,500	62,500
4	01 Aug 2005	Ir. Wawan K. Tolinggi	Anggota KPU	NA	1/KPU-KAB/VIII/2005	Honor	1,250,000	125,000	187,500	62,500
5	01 Aug 2005	Subhan Yunus Ibrahim, S.I.P.	Anggota KPU	NA	1/KPU-KAB/VIII/2005	Honor	1,250,000	125,000	187,500	62,500
6	01 Aug 2005	Husni A. Deka, S.Sos.	Sekretaris KPU	IV/a	2/KPU-KAB/VIII/2005	Honor	275,000	41,250	41,250	-
7	01 Aug 2005	Sukri Moonti, S.H., M.H.	Ksb Umum Set. KPU	III/c	2/KPU-KAB/VIII/2005	Honor	200,000	30,000	30,000	-
8	01 Aug 2005	Drs. Djamaluddin Daeng Mile	Ksb Tek. Peny.	III/c	2/KPU-KAB/VIII/2005	Honor	200,000	30,000	30,000	-
9	01 Aug 2005	Fatma Tuna, S.Ag.	Ksb Huk. dan Humas	III/b	2/KPU-KAB/VIII/2005	Honor	200,000	30,000	30,000	-
10	01 Aug 2005	Haryanto Imran, S.E.	Bend. Set. KPU	III/a	2/KPU-KAB/VIII/2005	Honor	200,000	30,000	30,000	-
11	01 Aug 2005	Atmin Latif	Bend. Set. KPU	III/a	2/KPU-KAB/VIII/2005	Honor	250,000	37,500	37,500	-
12	01 Aug 2005	Maylan Tongkodu, S.Kom.	Staff Set. KPU	III/a	2/KPU-KAB/VIII/2005	Honor	175,000	26,250	26,250	-
13	01 Aug 2005	Subanrio Maliki, A. Ma. Ak.	Staff Set. KPU	II/d	2/KPU-KAB/VIII/2005	Honor	175,000	-	-	-
14	01 Aug 2005	Olan Ishak Yantiko	Staff Set. KPU	II/c	2/KPU-KAB/VIII/2005	Honor	175,000	-	-	-
15	01 Aug 2005	Suherdi Pou	Staff Set. KPU	II/c	2/KPU-KAB/VIII/2005	Honor	175,000	-	-	-
16	01 Aug 2005	Mansur Usman	Staff Set. KPU	II/b	2/KPU-KAB/VIII/2005	Honor	175,000	-	-	-
17	01 Aug 2005	Wahab Kau	Staff Set. KPU	II/a	2/KPU-KAB/VIII/2005	Honor	175,000	-	-	-
18	01 Aug 2005	Farid Wolinga	Staff Set. KPU	II/a	2/KPU-KAB/VIII/2005	Honor	175,000	-	-	-
19	01 Aug 2005	Nurjamal Dasa Prawiranegara	Staff Set. KPU	II/a	2/KPU-KAB/VIII/2005	Honor	175,000	-	-	-
20	18 Aug 2005	Obow Bakar Mohamad Ali, S.E.	Anggota KPU	NA	1/1.2/KPU-KAB/VII/2005	Honor	250,000	37,500	37,500	-

LAMPIRAN III
Keterlambatan Setoran Pajak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

LAMPIRAN KETERLAMBATAN SETORAN PAJAK PPh Pasal 21

No. BKU	Tanggal Pungutan	Tanggal Disetor	Rekening RKA	Penerimaan	Pengeluaran	Jumlah Hari Keterlambatan
1	2		4	5	6	7
58	10 Mar 2005	21 May 2005	PPh Pasal 21	1,300,000	1,300,000	71
60	10 Mar 2005	21 May 2005	PPh Pasal 21	297,500	297,500	71
85	16 Mar 2005	21 May 2005	PPh Pasal 21	510,000	510,000	65
137	23 Mar 2005	21 May 2005	PPh Pasal 21	200,000	200,000	58
139	23 Mar 2005	21 May 2005	PPh Pasal 21	200,000	200,000	58
155	26 Mar 2005	21 May 2005	PPh Pasal 21	135,000	135,000	55
157	26 Mar 2005	21 May 2005	PPh Pasal 21	430,000	430,000	55
194	30 Mar 2005	21 May 2005	PPh Pasal 21	130,000	130,000	51
252	31 Mar 2005	21 May 2005	PPh Pasal 21	112,500	1,300,000	50
260	02 Apr 2005	21 May 2005	PPh Pasal 21	1,300,000	112,500	48
289	06 Apr 2005	21 May 2005	PPh Pasal 21	70,000	70,000	44
291	06 Apr 2005	21 May 2005	PPh Pasal 21	70,000	70,000	44
293	06 Apr 2005	21 May 2005	PPh Pasal 21	70,000	70,000	44
295	06 Apr 2005	21 May 2005	PPh Pasal 21	70,000	70,000	44
297	06 Apr 2005	21 May 2005	PPh Pasal 21	70,000	70,000	44
299	06 Apr 2005	21 May 2005	PPh Pasal 21	70,000	70,000	44
301	06 Apr 2005	21 May 2005	PPh Pasal 21	70,000	70,000	44
303	06 Apr 2005	21 May 2005	PPh Pasal 21	70,000	70,000	44
305	06 Apr 2005	21 May 2005	PPh Pasal 21	70,000	70,000	44
307	06 Apr 2005	21 May 2005	PPh Pasal 21	70,000	70,000	44
309	06 Apr 2005	21 May 2005	PPh Pasal 21	70,000	70,000	44
311	06 Apr 2005	21 May 2005	PPh Pasal 21	70,000	70,000	44
313	06 Apr 2005	21 May 2005	PPh Pasal 21	70,000	70,000	44
315	06 Apr 2005	21 May 2005	PPh Pasal 21	70,000	70,000	44
317	06 Apr 2005	21 May 2005	PPh Pasal 21	70,000	70,000	44
319	06 Apr 2005	21 May 2005	PPh Pasal 21	70,000	70,000	44
321	06 Apr 2005	21 May 2005	PPh Pasal 21	70,000	70,000	44
449	11 May 2005	27 May 2005	PPh Pasal 21	382,500	382,500	15
451	11 May 2005	27 May 2005	PPh Pasal 21	382,500	382,500	15
489	13 May 2005	27 May 2005	PPh Pasal 21	180,000	180,000	13
502	20 May 2005	27 May 2005	PPh Pasal 21	75,000	75,000	6
504	20 May 2005	27 May 2005	PPh Pasal 21	225,000	225,000	6
612	31 May 2005	02 Jun 2005	PPh Pasal 21	180,000	180,000	1
702	14 Jun 2005	20 Jun 2005	PPh Pasal 21	1,486,350	1,486,350	5
725	16 Jun 2005	20 Jun 2005	PPh Pasal 21	529,500	529,500	3
729	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 21	30,000	30,000	13
734	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 21	30,000	30,000	13
739	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 21	30,000	30,000	13
744	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 21	15,000	15,000	13
749	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 21	45,000	45,000	13
754	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 21	30,000	30,000	13
759	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 21	15,000	15,000	13
768	16 Jun 2005	02 Jul 2005	PPh Pasal 21	15,000	15,000	15

773	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 21	15,000	15,000	13
778	16 Jun 2005	02 Jul 2005	PPh Pasal 21	30,000	30,000	15
783	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 21	30,000	30,000	13
788	16 Jun 2005	02 Jul 2005	PPh Pasal 21	15,000	15,000	15
793	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 21	15,000	15,000	13
798	16 Jun 2005	02 Jul 2005	PPh Pasal 21	15,000	15,000	15
803	16 Jun 2005	02 Jul 2005	PPh Pasal 21	15,000	15,000	15
808	16 Jun 2005	02 Jul 2005	PPh Pasal 21	30,000	30,000	15
820	17 Jun 2005	02 Jul 2005	PPh Pasal 21	82,500	82,500	14
837	20 Jun 2005	02 Jul 2005	PPh Pasal 21	60,000	60,000	11
839	20 Jun 2005	02 Jul 2005	PPh Pasal 21	97,500	97,500	11
881	28 Jun 2005	02 Jul 2005	PPh Pasal 21	540,000	540,000	3
886	29 Jun 2005	04 Jul 2005	PPh Pasal 21	300,000	300,000	4
902	30 Jun 2005	04 Jul 2005	PPh Pasal 21	58,701	58,701	3
904	30 Jun 2005	08 Jul 2005	PPh Pasal 21	157,500	157,500	7
967	01 Jul 2005	08 Jul 2005	PPh Pasal 21	352,500	352,500	6
1113	30 Jul 2005	06 Aug 2005	PPh Pasal 21	225,000	225,000	6
1118	01 Aug 2005	04 Aug 2005	PPh Pasal 21	650,000	650,000	2
1120	01 Aug 2005	06 Aug 2005	PPh Pasal 21	225,000	225,000	4
	JUMLAH		62 item	12,369,551	12,369,551	

LAMPIRAN III
Keterlambatan Setoran Pajak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

LAMPIRAN KETERLAMBATAN SETORAN PAJAK PPh Pasal 22

No. BKU	Tanggal Pungutan	Tanggal Disetor	Rekening RKA	Penerimaan	Pengeluaran	Jumlah Hari Keterlambatan
1	2		4	5	6	7
53	10 Mar 2005	21 May 2005	PPh Pasal 22	21,600	21,600	71
107	19 Mar 2005	21 May 2005	PPh Pasal 22	244,731	244,731	62
116	21 Mar 2005	21 May 2005	PPh Pasal 22	18,810	18,810	60
131	23 Mar 2005	21 May 2005	PPh Pasal 22	96,000	96,000	58
148	24 Mar 2005	21 May 2005	PPh Pasal 22	30,000	30,000	57
224	31 Mar 2005	21 May 2005	PPh Pasal 22	54,525	54,525	50
471	12 May 2005	27 May 2005	PPh Pasal 22	20,183	20,183	14
709	16 Jun 2005	20 Jul 2005	PPh Pasal 22	33,409	33,409	33
728	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 22	38,880	38,880	13
733	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 22	20,520	20,520	13
738	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 22	39,960	39,960	13
743	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 22	24,840	24,840	13
748	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 22	24,300	24,300	13
753	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 22	31,320	31,320	13
763	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 22	36,180	36,180	13
767	16 Jun 2005	02 Jul 2005	PPh Pasal 22	27,000	27,000	15
772	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 22	25,380	25,380	13
777	16 Jun 2005	02 Jul 2005	PPh Pasal 22	22,140	22,140	15
782	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 22	34,560	34,560	13
787	16 Jun 2005	02 Jul 2005	PPh Pasal 22	21,600	21,600	15
792	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 22	37,800	37,800	13
797	16 Jun 2005	02 Jul 2005	PPh Pasal 22	22,680	22,680	15
802	16 Jun 2005	02 Jul 2005	PPh Pasal 22	17,820	17,820	15
807	16 Jun 2005	02 Jul 2005	PPh Pasal 22	16,740	16,740	15
877	28 Jun 2005	12 Jul 2005	PPh Pasal 22	32,727	32,727	13
899	30 Jun 2005	14 Jul 2005	PPh Pasal 22	100,000	100,000	13
900	30 Jun 2005	14 Jul 2005	PPh Pasal 22	15,000	15,000	13
1019	04 Jul 2005	05 Aug 2005	PPh Pasal 22	405,277	405,277	31
	JUMLAH		28 item	1,513,982	1,513,982	

LAMPIRAN III
Keterlambatan Setoran Pajak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

LAMPIRAN KETERLAMBATAN SETORAN PAJAK PPh Pasal 23

No. BKU	Tanggal Pungutan	Tanggal Disetor	Rekening RKA	Penerimaan	Pengeluaran	Jumlah Hari Keterlambatan
1	2		4	5	6	7
11	09 Mar 2005	21 May 2005	PPh Pasal 23	56,925	56,925	72
13	09 Mar 2005	21 May 2005	PPh Pasal 23	10,737	10,737	72
16	10 Mar 2005	21 May 2005	PPh Pasal 23	74,304	74,304	71
67	12 Mar 2005	21 May 2005	PPh Pasal 23	36,120	36,120	69
78	16 Mar 2005	21 May 2005	PPh Pasal 23	126,000	126,000	65
98	18 Mar 2005	21 May 2005	PPh Pasal 23	225,000	225,000	63
121	22 Mar 2005	21 May 2005	PPh Pasal 23	1,678,050	1,678,050	59
142	24 Mar 2005	21 May 2005	PPh Pasal 23	95,355	95,355	57
189	30 Mar 2005	21 May 2005	PPh Pasal 23	101,700	101,700	51
200	30 Mar 2005	21 May 2005	PPh Pasal 23	111,870	111,870	51
203	30 Mar 2005	21 May 2005	PPh Pasal 23	456,354	456,354	51
206	30 Mar 2005	21 May 2005	PPh Pasal 23	40,500	40,500	51
208	30 Mar 2005	21 May 2005	PPh Pasal 23	57,000	57,000	51
210	30 Mar 2005	21 May 2005	PPh Pasal 23	60,426	60,426	51
214	30 Mar 2005	21 May 2005	PPh Pasal 23	13,950	13,950	51
221	31 Mar 2005	21 May 2005	PPh Pasal 23	118,650	118,650	50
244	31 Mar 2005	21 May 2005	PPh Pasal 23	98,145	98,145	50
265	04 Apr 2005	21 May 2005	PPh Pasal 23	13,167	13,167	46
270	04 Apr 2005	21 May 2005	PPh Pasal 23	198,000	198,000	46
367	20 Apr 2005	21 May 2005	PPh Pasal 23	2,130,000	2,130,000	30
377	21 Apr 2005	21 May 2005	PPh Pasal 23	37,215	37,215	29
411	09 May 2005	27 May 2005	PPh Pasal 23	6,540	6,540	17
417	09 May 2005	27 May 2005	PPh Pasal 23	4,500	4,500	17
420	09 May 2005	27 May 2005	PPh Pasal 23	24,000	24,000	17
422	09 May 2005	27 May 2005	PPh Pasal 23	7,500	7,500	17
427	09 May 2005	27 May 2005	PPh Pasal 23	32,733	32,733	17
439	10 May 2005	27 May 2005	PPh Pasal 23	33,000	33,000	16
441	10 May 2005	27 May 2005	PPh Pasal 23	108,000	108,000	16
474	12 May 2005	27 May 2005	PPh Pasal 23	18,468	18,468	14
480	13 May 2005	27 May 2005	PPh Pasal 23	108,000	108,000	13
507	20 May 2005	27 May 2005	PPh Pasal 23	28,020	28,020	6
605	28 May 2005	01 Jun 2005	PPh Pasal 23	10,500	10,500	3
614	31 May 2005	03 Jun 2005	PPh Pasal 23	10,500	10,500	2
653	06 Jun 2005	12 Jul 2005	PPh Pasal 23	44,093	44,093	35
663	08 Jun 2005	11 Jun 2005	PPh Pasal 23	232,737	232,737	2
667	09 Jun 2005	11 Jun 2005	PPh Pasal 23	12,810	12,810	1
688	09 Jun 2005	11 Jun 2005	PPh Pasal 23	274,239	274,239	1
704	14 Jun 2005	20 Jun 2005	PPh Pasal 23	4,800	4,800	5
706	14 Jun 2005	20 Jun 2005	PPh Pasal 23	4,800	4,800	5
715	16 Jun 2005	20 Jun 2005	PPh Pasal 23	64,636	64,636	3
718	16 Jun 2005	20 Jun 2005	PPh Pasal 23	193,636	193,636	3
720	16 Jun 2005	20 Aug 2005	PPh Pasal 23	58,500	58,500	64

723	16 Jun 2005	20 Jun 2005	PPh Pasal 23	285,545	285,545	3
730	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 23	25,320	25,320	13
735	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 23	23,280	23,280	13
740	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 23	25,440	25,440	13
745	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 23	23,760	23,760	13
750	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 23	23,700	23,700	13
755	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 23	24,480	24,480	13
760	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 23	25,800	25,800	13
764	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 23	25,020	25,020	13
769	16 Jun 2005	02 Jul 2005	PPh Pasal 23	24,000	24,000	15
774	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 23	23,820	23,820	13
779	16 Jun 2005	02 Jul 2005	PPh Pasal 23	23,460	23,460	15
784	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 23	24,840	24,840	13
789	16 Jun 2005	02 Jul 2005	PPh Pasal 23	23,400	23,400	15
794	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 23	25,200	25,200	13
799	16 Jun 2005	02 Jul 2005	PPh Pasal 23	23,520	23,520	15
804	16 Jun 2005	02 Jul 2005	PPh Pasal 23	22,980	22,980	15
809	16 Jun 2005	02 Jul 2005	PPh Pasal 23	22,860	22,860	15
822	17 Jun 2005	20 Jun 2005	PPh Pasal 23	12,300	12,300	2
824	17 Jun 2005	20 Jun 2005	PPh Pasal 23	15,000	15,000	2
826	17 Jun 2005	20 Jun 2005	PPh Pasal 23	57,000	57,000	2
828	18 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 23	42,000	42,000	11
830	18 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 23	36,000	36,000	11
832	19 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 23	42,000	42,000	10
858	22 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 23	122,727	122,727	7
861	22 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 23	59,250	59,250	7
869	26 Jun 2005	02 Jul 2005	PPh Pasal 23	9,000	9,000	5
871	26 Jun 2005	02 Jul 2005	PPh Pasal 23	12,000	12,000	5
873	26 Jun 2005	02 Jul 2005	PPh Pasal 23	9,000	9,000	5
879	28 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 23	54,000	54,000	1
884	28 Jun 2005	30 Jun 2005	PPh Pasal 23	73,636	73,636	1
888	29 Jun 2005	02 Jul 2005	PPh Pasal 23	42,000	42,000	2
972	02 Jul 2005	19 Jul 2005	PPh Pasal 23	30,000	30,000	16
975	02 Jul 2005	12 Jul 2005	PPh Pasal 23	321,818	321,818	9
1014	04 Jul 2005	13 Jul 2005	PPh Pasal 23	68,182	68,182	8
1021	04 Jul 2005	13 Jul 2005	PPh Pasal 23	6,000	6,000	8
1031	05 Jul 2005	12 Jul 2005	PPh Pasal 23	466,364	466,364	6
1041	07 Jul 2005	12 Jul 2005	PPh Pasal 23	39,000	39,000	4
1043	07 Jul 2005	12 Jul 2005	PPh Pasal 23	12,000	12,000	4
1058	11 Jul 2005	13 Jul 2005	PPh Pasal 23	6,000	6,000	1
1084	14 Jul 2005	20 Jul 2005	PPh Pasal 23	21,000	21,000	5
1115	30 Jul 2005	11 Aug 2005	PPh Pasal 23	32,541	32,541	11
1123	01 Aug 2005	03 Aug 2005	PPh Pasal 23	136,364	136,364	1
1141	05 Aug 2005	13 Aug 2005	PPh Pasal 23	30,000	30,000	7
1148	08 Aug 2005	26 Aug 2005	PPh Pasal 23	15,000	15,000	17
1168	30 Aug 2005	01 Sep 2005	PPh Pasal 23	9,630	9,630	1
	JUMLAH		88 item	9,497,717	9,497,717	

LAMPIRAN III
Keterlambatan Setoran Pajak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

LAMPIRAN KETERLAMBATAN SETORAN PAJAK PPN

No. BKU	Tanggal Pungutan	Tanggal Disetor	Rekening RKA	Penerimaan	Pengeluaran	Jumlah Hari Keterlambatan
1	2		4	5	6	7
17	10 Mar 2005	21 May 2005	PPN	116,409	116,409	71
54	10 Mar 2005	21 May 2005	PPN	141,840	141,840	71
79	16 Mar 2005	21 May 2005	PPN	197,400	197,400	65
99	18 Mar 2005	21 May 2005	PPN	352,500	352,500	63
108	19 Mar 2005	21 May 2005	PPN	1,607,066	1,607,066	62
117	21 Mar 2005	21 May 2005	PPN	123,519	123,519	60
122	22 Mar 2005	21 May 2005	PPN	3,107,500	3,107,500	59
132	23 Mar 2005	21 May 2005	PPN	630,400	630,400	58
143	24 Mar 2005	21 May 2005	PPN	149,389	149,389	57
149	24 Mar 2005	21 May 2005	PPN	197,000	197,000	57
190	30 Mar 2005	21 May 2005	PPN	159,330	159,330	51
201	30 Mar 2005	21 May 2005	PPN	175,263	175,263	51
204	30 Mar 2005	21 May 2005	PPN	714,954	714,954	51
211	30 Mar 2005	21 May 2005	PPN	94,667	94,667	51
222	31 Mar 2005	21 May 2005	PPN	185,885	185,885	50
225	31 Mar 2005	21 May 2005	PPN	358,047	358,047	50
245	31 Mar 2005	21 May 2005	PPN	153,760	153,760	50
271	04 Apr 2005	21 May 2005	PPN	310,200	310,200	46
368	20 Apr 2005	21 May 2005	PPN	3,337,000	3,337,000	30
442	10 May 2005	27 May 2005	PPN	169,200	169,200	16
470	12 May 2005	27 May 2005	PPN	149,500	149,500	14
481	13 May 2005	27 May 2005	PPN	169,200	169,200	13
652	06 Jun 2005	12 Jul 2005	PPN	293,955	293,955	35
662	08 Jun 2005	11 Jun 2005	PPN	430,995	430,995	2
687	09 Jun 2005	11 Jun 2005	PPN	507,850	507,850	1
708	16 Jun 2005	20 Jul 2005	PPN	222,727	222,727	33
711	16 Jun 2005	02 Jul 2005	PPN	375,474	375,474	15
712	16 Jun 2005	02 Jul 2005	PPN	182,276	182,276	15
714	16 Jun 2005	20 Jun 2005	PPN	107,727	107,727	3
717	16 Jun 2005	20 Jun 2005	PPN	322,727	322,727	3
722	16 Jun 2005	20 Jun 2005	PPN	475,909	475,909	3
727	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPN	288,000	288,000	13
732	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPN	152,000	152,000	13
737	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPN	296,000	296,000	13
742	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPN	184,000	184,000	13
747	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPN	180,000	180,000	13
752	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPN	232,000	232,000	13
757	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPN	320,000	320,000	13
758	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPN	43,200	43,200	13
762	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPN	268,000	268,000	13
766	16 Jun 2005	02 Jul 2005	PPN	200,000	200,000	15
771	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPN	188,000	188,000	13
776	16 Jun 2005	02 Jul 2005	PPN	164,000	164,000	15

781	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPN	256,000	256,000	13
786	16 Jun 2005	02 Jul 2005	PPN	160,000	160,000	15
791	16 Jun 2005	30 Jun 2005	PPN	280,000	280,000	13
796	16 Jun 2005	02 Jul 2005	PPN	168,000	168,000	15
801	16 Jun 2005	02 Jul 2005	PPN	132,000	132,000	15
806	16 Jun 2005	02 Jul 2005	PPN	124,000	124,000	15
857	22 Jun 2005	30 Jun 2005	PPN	204,545	204,545	7
865	26 Jun 2005	30 Jun 2005	PPN	209,091	209,091	3
866	26 Jun 2005	30 Jun 2005	PPN	125,455	125,455	3
876	28 Jun 2005	12 Jul 2005	PPN	218,182	218,182	13
883	28 Jun 2005	30 Jun 2005	PPN	122,727	122,727	1
974	02 Jul 2005	12 Jul 2005	PPN	536,364	536,364	9
1013	04 Jul 2005	13 Jul 2005	PPN	113,636	113,636	8
1018	04 Jul 2005	05 Aug 2005	PPN	3,002,055	3,002,055	31
1030	05 Jul 2005	12 Jul 2005	PPN	777,273	777,273	6
1122	01 Aug 2005	03 Aug 2005	PPN	227,273	227,273	1
	JUMLAH		59 item	24,691,470	24,691,470	

LAMPIRAN III
Keterlambatan Setoran Pajak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD)

LAMPIRAN KETERLAMBATAN SETORAN PAJAK DAERAH

No.	Tanggal Pungutan	Tanggal Disetor	Rekening RKA	Penerimaan	Pengeluaran	Jumlah Hari Keterlambatan
1	2		4	5	6	7
413	09 May 2005	25 May 2005	Pajak Daerah	12,500	12,500	15
415	09 May 2005	25 May 2005	Pajak Daerah	12,500	12,500	15
425	09 May 2005	25 May 2005	Pajak Daerah	25,000	25,000	15
444	11 May 2005	25 May 2005	Pajak Daerah	25,000	25,000	13
446	11 May 2005	25 May 2005	Pajak Daerah	62,500	62,500	13
483	13 May 2005	25 May 2005	Pajak Daerah	12,500	12,500	11
495	17 May 2005	25 May 2005	Pajak Daerah	17,500	17,500	7
497	18 May 2005	25 May 2005	Pajak Daerah	17,500	17,500	6
	JUMLAH		8 item	185,000	185,000	

LAMPIRAN IV

HONORARIUM KELOMPOK KERJA YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN
KPUD KABUPATEN GORONTALO

No.	No. BKU	Tanggal Pembayaran	Vol (org)	No. SK KPU	Atas Nama	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Jumlah	Selisih Dgn Ketentuan*	PPH Sdh Disetor	Sisa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	154	26 Mar 2005	5	3/2005	Ir. Wawan K. Tolinggi	10 Mar 2005	---	400,000	150,000	40,000	110,000
					Drs. Djamaluddin Daeng Mile			400,000	150,000	40,000	110,000
					Nurhayati Buluati, S.Sos.			275,000	25,000	27,500	(2,500)
					Risman K. Umar, S.Sos.			275,000	25,000	27,500	(2,500)
					Suherdi Pou			275,000	25,000	-	25,000
2	156	26 Mar 2005	8	2/2005	Obow Bakar Mohamad Ali, S.E.	10 Mar 2005	---	650,000	400,000	65,000	335,000
					Husni A. Deka, S.Sos.			650,000	400,000	65,000	335,000
					Sukri Moonti, S.H., M.H.			600,000	350,000	60,000	290,000
					Drs. Djamaluddin Daeng Mile			600,000	350,000	60,000	290,000
					Fatma Tuna, S.Ag.			600,000	350,000	60,000	290,000
					Yusuf Tomayahu, S.H.			600,000	350,000	60,000	290,000
					Hasni D. Lamanasa, S.T.P.			600,000	350,000	60,000	290,000
					Husna Tilahunga			500,000	250,000	-	250,000
	3885a	29 Jun 2005	24	36/2005	Ir. Rully Henga	16 Jun 2005	---	250,000	-	37,500	-
	885b				Risman K. Umar, S.Sos.			250,000	-	37,500	-
	885c				Suherdi Pou			250,000	-	-	-
					Mansur Usman			250,000	-	-	-
					Haryanto Imran, S.E.			250,000	-	37,500	-
					Subanrio Maliki, A. Ma. Ak.			250,000	-	-	-
					Husna Tilahunga			250,000	-	-	-

LAMPIRAN IV

HONORARIUM KELOMPOK KERJA YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN
KPUD KABUPATEN GORONTALO (Bagian 2 dari 2)

No.	No. BKU	Tanggal Pembayaran	Vol (org)	No. SK KPU	Atas Nama	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Jumlah	Selisih Dgn Ketentuan*	PPH Sdh Disetor	Sisa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3885a	(lanjutan ...)			Serli Deoli			250,000	-	-	-
	885b				Hamdan Zain S.Fil.I.			250,000	-	37,500	-
	885c				Yusuf Tomayahu, S.H.			250,000	-	37,500	-
					Olan Ishak Yantiko			250,000	-	-	-
					Maylan Tongkodu, S.Kom.			250,000	-	37,500	-
					Farid Wolinga			250,000	-	-	-
					Atmin Latif			250,000	-	37,500	-
					Nurhayati Buluati, S.Sos.			250,000	-	37,500	-
					Abdurrahman Pakaya, B.B.A.			250,000	-	-	-
					Sucipto Abdullah			250,000	-	-	-
					Yahya Lamatenggo			250,000	-	37,500	-
					Andi Ulfa Abd. Aziz, A.Md.			250,000	-	-	-
					Andi Mulyadi Daud			250,000	-	-	-
					Nurjamal Dasa Prawiranegara			250,000	-	-	-
					Chandra Henga			250,000	-	-	-
					Friyanto Hatibie			250,000	-	-	-
					Rahma Saleh, S.Pd.			250,000	-	-	-
					JUMLAH			12,425,000	3,175,000	902,500	2,610,000

*) menurut Permendagri 21/2005, pembayaran honor pokja tertinggi per bulan yaitu 10 orang x Rp 250.000 = Rp 2.500.000

DAFTAR PEMUNGUTAN PAJAK PPh Pasal 21 YANG TERLAMBAT DISETOR

No.BKU	No. Afek.	Rekening RKA	Tanggal Pemungutan Pajak	Jumlah Pungutan Pajak	Tanggal Disetor	Pengeluaran	Jumlah Hari Keterlambatan
1	2	3	4	5	6	7	8
9	1	PPh Pasal 21	11 Apr 2005	960,000	29 Apr 2005	960,000	17
10	1	PPh Pasal 21	11 Apr 2005	37,500	29 Apr 2005	37,500	17
2	1	PPh Pasal 21	01 May 2005	990,000	01 Jun 2005	990,000	30
26	1	PPh Pasal 21	01 Jun 2005	990,000	16 Jun 2005	990,000	14
31	1	PPh Pasal 21	01 Jul 2005	990,000	30 Jul 2005	990,000	28
33	1	PPh Pasal 21	01 Aug 2005	990,000	01 Sep 2005	990,000	30
				4,957,500		4,957,500	

DAFTAR PEMUNGUTAN PAJAK PPh Pasal 23 YANG TERLAMBAT DISETOR

No.BKU	No. Afek.	Rekening RKA	Tanggal Pemungutan Pajak	Jumlah Pungutan Pajak	Tanggal Disetor	Pengeluaran	Jumlah Hari Keterlambatan
1	2	3	4	5	6	7	8
13	3	PPh Pasal 23	30 Apr 2005	30,000	01 Sep 2005	30,000	123
14	3	PPh Pasal 23	30 Apr 2005	15,000	20 Jun 2005	15,000	50
15	3	PPh Pasal 23	30 Apr 2005	42,000	20 Jun 2005	42,000	50
16	3	PPh Pasal 23	30 Apr 2005	54,000	20 Jun 2005	54,000	50
18	3	PPh Pasal 23	30 Apr 2005	45,000	20 Jun 2005	45,000	50
25	3	PPh Pasal 23	28 May 2005	60,000	20 Jun 2005	60,000	22
29	3	PPh Pasal 23	30 Jun 2005	60,000	01 Sep 2005	60,000	62
30	3	PPh Pasal 23	30 Jun 2005	30,000	01 Sep 2005	30,000	62
				336,000		336,000	

DAFTAR PEMUNGUTAN PAJAK HOTEL RESTORAN YANG TERLAMBAT DISETOR

No.BKU	No. Afek.	Rekening RKA	Tanggal Pemungutan Pajak	Jumlah Pungutan Pajak	Tanggal Disetor	Pengeluaran	Jumlah Hari Keterlambatan
1	2	3	4	5	6	7	8
2	5	Pajak Daerah	30 Mar 2005	60,000	01 Sep 2005	60,000	154
3	5	Pajak Daerah	30 Mar 2005	140,000	01 Sep 2005	140,000	154
4	5	Pajak Daerah	30 Mar 2005	140,000	01 Sep 2005	140,000	154
5	5	Pajak Daerah	30 Mar 2005	225,000	01 Sep 2005	225,000	154
8	5	Pajak Daerah	11 Apr 2005	5,000	01 Sep 2005	5,000	142
11	5	Pajak Daerah	11 Apr 2005	40,000	01 Sep 2005	40,000	142
12	5	Pajak Daerah	27 Apr 2005	40,000	01 Sep 2005	40,000	126
17	5	Pajak Daerah	30 Apr 2005	5,000	01 Sep 2005	5,000	123
28	5	Pajak Daerah	24 Jun 2005	105,000	01 Sep 2005	105,000	68
35	5	Pajak Daerah	30 Jul 2005	105,000	01 Sep 2005	105,000	32
35	5	Pajak Daerah	11 Aug 2005	105,000	01 Sep 2005	105,000	20
				970,000		970,000	

DAFTAR REKAPITULASI HASIL PEMERIKSAAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN PENYELENGGARAAN PILKADA TAHUN 2005

Departemen/Lembaga/Pemda/BUMN/BUMD : KPUD dan Panwas Kabupaten Gorontalo
Tahun Anggaran 2005

(nilai dalam juta rupiah)

NO.	Nama/Obrik/sasaran		Jumlah Anggaran	Jumlah Realisasi Anggaran	Nilai Yang Diperiksa	% Cakrik	Total Nilai Temuan Yang Ditemukan Pada Saat Pemeriksaan			Rincian Temuan								Pendapat Opini (Pemeriksaan atas Laporan Keuangan)	Tingkat Pencapaian Kinerja			
										Ketertiban dan Ketaatan (2K)				Khematan dan Efisiensi		Efektifitas						
	Jenis Entitas	Jml					Jml	Nilai	%	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai			Jml	Nilai	Jml
1	2	3	4	5	6	7=6:5	8	9	10=9:6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1.	KPUD Kabupaten Gorontalo	1																				
	Belanja Pemkab		5.415,07	4.041,64	4.033,94	99,81																
	Penerimaan		4.041,64	4.033,94	4.033,94	100																
	Pengeluaran		4.033,94	3.960,60	3.960,60	100	5	77,36	1,95	1	13,44	1	3,56	3	60,36							
2.	Panwas Kabupaten Gorontalo	1																				
	Belanja Pemkab		632,72	575,54	575,54	100																
	Penerimaan		575,54	575,54	575,54	100																
	Belanja		575,54	575,54	575,54	100	3	28,66	4,98	1	22,4	2	6,26									

Makassar, Januari 200

Kepala Perwakilan,

Drs. Supriyanto
NIP. 240000915